



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

20
22

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023

Kepala Biro Pengawasan Internal



Abbas

Amanat Presiden

Ende, 1 Juni 2022



"Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia"

Joko Widodo - Presiden R.I

HIGHLIGHT 2022



JANUARI

24 PEMBEKALAN KEPALA BPIP KEPADA 1500 SISWA
POLRI, MARKAS POLDA PAPUA BARAT



FEBUARI

9-11 PELAKSANAAN PENETAPAN
PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA ANGKATAN



MARET

3 RAPAT PIMPINAN TNI AD MARKAS BESAR
ANGKATAN DARAT (MABESAD)



APRIL

5-9 DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN HASIL
PENGUKURAN INDEKS AKTUALISASI PANCASILA



MEI

23-26 DIKLAT PIP BAGI ORGANISASI SOSIAL DAN
POLITIK



JUNI

1 UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA





JULI

12 SEMINAR PANCASILA 2022 SERIES 1



AGUSTUS

15 PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2022



SEPTEMBER

21 RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI II DPR RI



OKTOBER

6 SEMINAR BUDAYA NUSANTARA



NOVEMBER

3 EVALUASI PIP SEMINAR AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN ORMAS KOTA YOGYAKARTA



DESEMBER

3 PENANGUGERAHAN IKON PRESTASI PANCASILA DAN KIRAB PANCASILA



Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Highlight 2022.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Istilah.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xii
Bab I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Aspek Strategis.....	7
E. Isu Strategis.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis BPIP.....	11
B. Rencana Kerja BPIP.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja.....	17
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
a. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.....	24
b. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda.....	31
c. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.....	56
d. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.....	62
B. Capaian Realisasi Anggaran.....	80
C. Hambatan.....	83
D. Upaya Mengatasi Hambatan.....	84
E. Rencana Ke Depan.....	84
Bab IV Penutup.....	88
Penutup.....	88
Lampiran.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP	5
Tabel 2. 1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2022	14
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2022	17
Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP	19
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2022	23
Tabel 3. 3 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2022	23
Tabel 3. 4 IKU Capaian Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3. 5 IKU Capaian Sasaran Strategis 2	31
Tabel 3. 6 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga:	31
Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya	37
Tabel 3. 8 MoU & Perjanjian Kerjasama Pengarustamaan Ideologi Pancasila	43
Tabel 3. 9 Tabel kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan	48
Tabel 3. 10 Kelompok Masyarakat yang telah dilakukan pembudayaan	50
Tabel 3. 11 Daftar Peraturan/Regulasi yang diberikan Rekomendasi	54
Tabel 3. 12 IKU Capaian Sasaran Strategis 3	56
Tabel 3. 13 Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	56
Tabel 3. 14 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengendalian	61
Tabel 3. 15 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi	61
Tabel 3. 16 IKU Capaian Sasaran Strategis 4	62
Tabel 3. 17 Penilaian PMPRB Sesuai Aplikasi PMPRB	63
Tabel 3. 18 Hasil Penilaian Sistem Merit	70
Tabel 3. 19 Hasil Tindak lanjut Rekomendasi Evalausi SAKIP	73
Tabel 3. 20 Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP	76
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rapat Dengar Pendapat DPR RI September 2022.....	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPIP.....	5
Gambar 1. 3 Isu Strategis BPIP	7
Gambar 2. 1 RPJMN 2020-2024 Terkait PIP	11
Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2020-2024	14
Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan.....	18
Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja	19
Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2022.....	20
Gambar 3. 1 Sistematisasi Kajian Konsepsi dan Dokumen Rujukan Aktualisasi Pancasila.....	26
Gambar 3. 2 Perubahan Indikator IAP.....	27
Gambar 3. 3 Tahapan Perhitungan IAP	27
Gambar 3. 4 Capaian Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Tahun 2020-2022....	28
Gambar 3. 5 Jumlah total subscribers youtube bpip tahun 2022	48
Gambar 3. 6 Dokumen Pengkajian Materi PIP	59
Gambar 3. 8 Nilai Indeks Profesionalitas BPIP.....	78
Gambar 3. 9 Trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPIP	80
Gambar 3. 10 Realisasi Anggaran Total.....	81
Gambar 3. 11 Realisasi Anggaran per Program.....	81
Gambar 3. 12 Realisasi Anggaran per Unit Kerja.....	82

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPPI	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	:Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang – Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kata Pengantar

Kepala BPIP



“Dengan Ideologi Pancasila, Indonesia mampu menjaga harmoni, kerukunan, keamanan dan ketertiban diantara masyarakat yang membenteng dan terpisahkan dari beribu pulau, suku dan agama”

Prof. K.H Drs. Yudian wahyudi, M.A. Ph.D.

Tahun 2022, Indonesia masih mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum selesai, perang terjadi, kelangkaan energi. Dampak berbagai krisis tersebut sangat dirasakan oleh Indonesia, namun demikian berbagai kebijakan negara yang telah dilakukan mulai melihatkan hasil mulai dari pemulihan ekonomi sampai mulai dihentikannya PSBB. Meskipun menghadapi berbagai masa krisis ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masih berupaya untuk melakukan kinerja secara maksimal dengan melakukan banyak transformasi proses bisnis dengan mengedepankan efisiensi serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan *achievement* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mencapai nilai kinerja sebesar 96,20%. Nilai kinerja instansi tersebut hanya gambaran yang masih dibutuhkan lebih banyak lagi usaha dan dukungan dari masyarakat agar BPIP bisa memberikan yang terbaik dalam menjadikan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) negara agar nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Dalam upaya Pembinaan Ideologi Pancasila yang lebih efektif dan efisien kami sangat mengapresiasi kepada Dewan Pengarah sebagai pembimbing juga seluruh pihak eksternal yang telah

bekerjasama dengan BPIP baik seluruh Kementerian/Lembaga, TNI/POLRI, instansi pemerintahan lainnya, Organisasi Masyarakat, swasta, dan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami berharap kerjasama sinergi Pembinaan Ideologi Pancasila bisa ditingkatkan lebih baik lagi untuk mewujudkan Pancasila dalam laku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi masyarakat bagaimana kinerja yang sudah dilakukan BPIP.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prof. K.H. Drs. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D.



RINGKASAN EKSEKUTIF

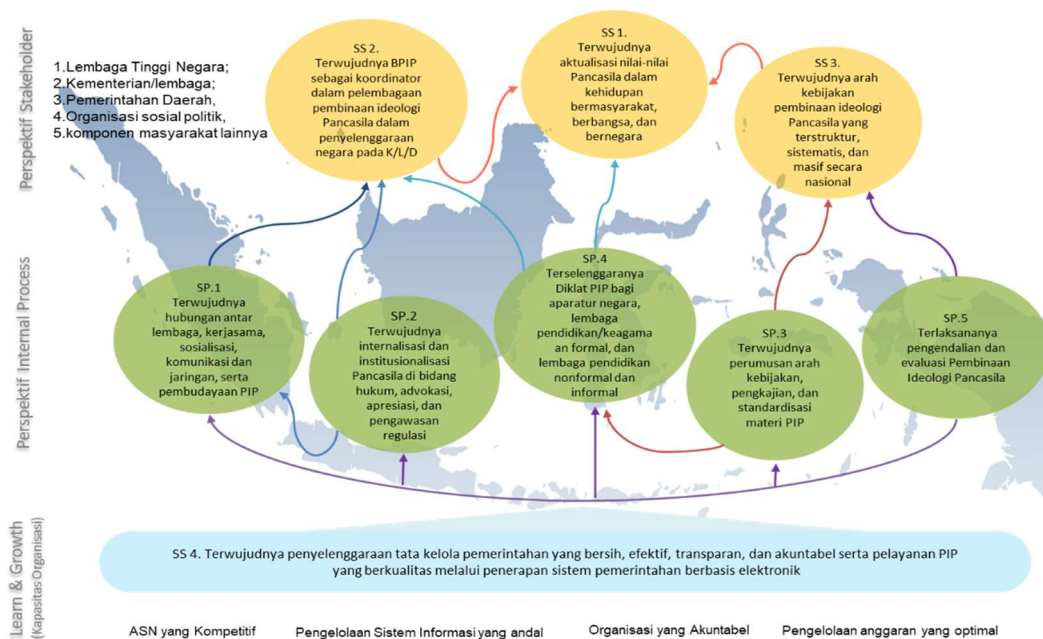
Arah kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Program PIP oleh BPIP menghasilkan output, outcome, dan impact dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Strategi PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hubungan sasaran strategis dan dukungan program PIP dapat dipetakan, sebagai berikut:



PETA STRATEGIS BPIP

Ukuran keberhasilan sasaran strategis pertama, yaitu terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2022 adalah hasil penghitungan Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila yang bertujuan mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disusun atas lima dimensi dan 23 indikator. Setiap dimensi mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai setiap Sila pada Pancasila, yang diterapkan di tengah masyarakat. Setiap indikator dipilih berdasarkan kajian konsepsi dan rujukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra BPIP 2020-2024, ketersediaan data di BPS, serta uji publik dengan para ahli. Nilai IAP tahun 2022 sebesar 72,93, menurun dari 76,78 pada tahun 2021 dan 75,84 pada tahun 2020 namun dikarenakan ada penyesuaian dan perubahan indikator yang digunakan menjadikan Nilai IAP tahun 2022 turun menjadi 72,93. Kondisi ini menunjukkan penurunan pengamalan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

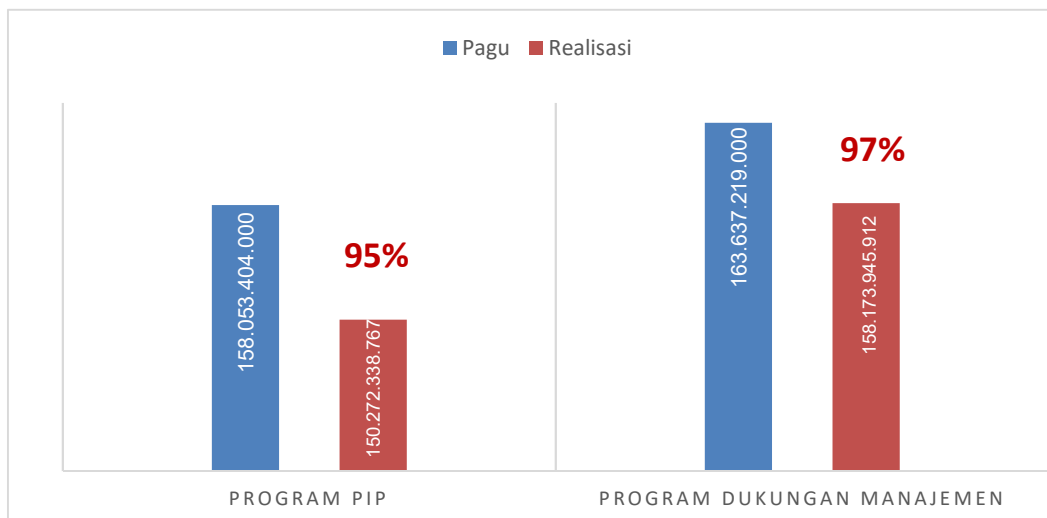
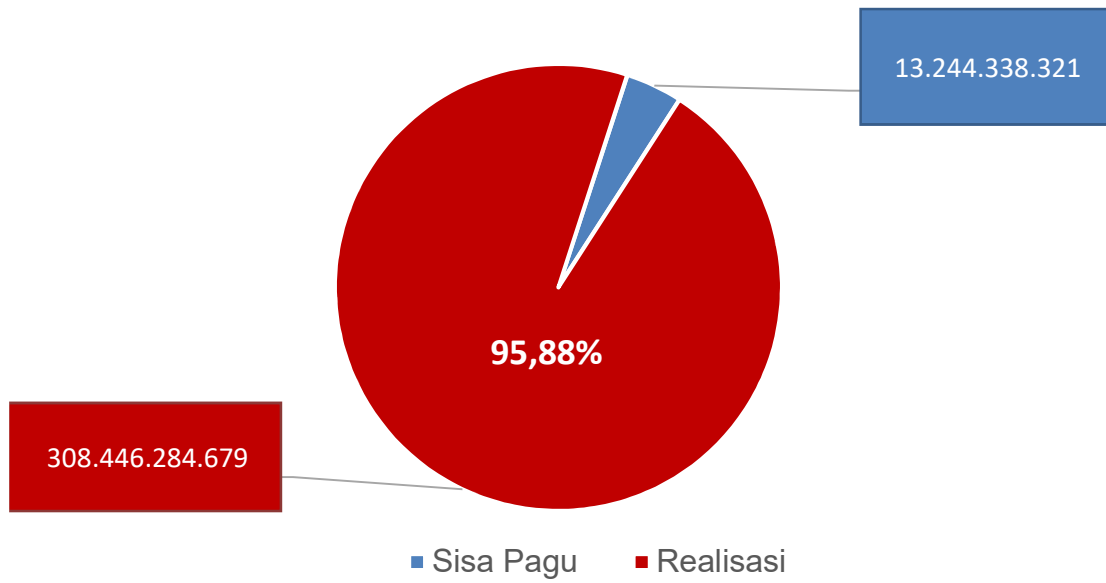
Capaian sasaran strategis kedua adalah BPIP menjadi Koordinator dalam pelebagaan PIP yang merupakan salah satu kunci dalam membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di bumi nusantara untuk menguatkan kembali ketahanan sosial politik, ekonomi, budaya. Target keberhasilan terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada

K/L/Daerah tahun 2022 adalah 60% (72 K/L/Daerah) (100% adalah 120 K/L/Daerah). Tahun 2022 tercapai 28 K/L/Daerah. Upaya BPIP menjadi koordinator dalam institusionalisasi PIP dapat dirasakan melalui adanya tindak lanjut hasil kesepahaman menjadi kerjasama PIP. Faktor pendukung implementasi institusionalisasi PIP tahun 2022 adalah keberhasilan hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi.

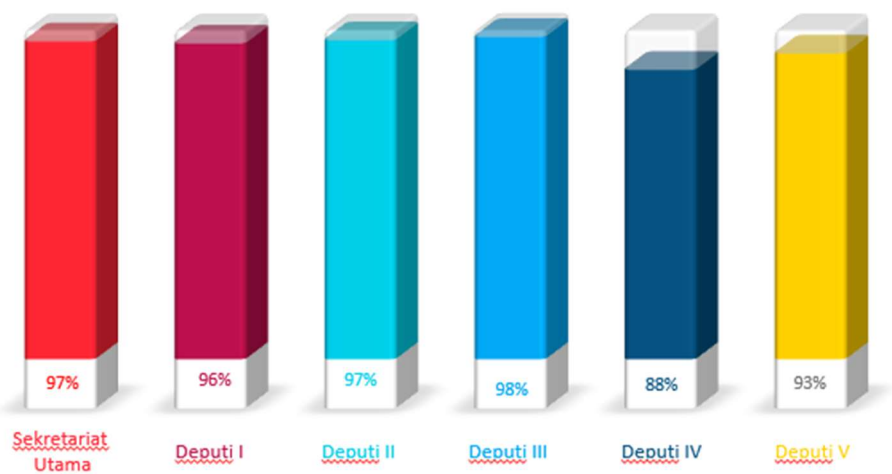
Capaian sasaran strategis ketiga adalah terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional. BPIP sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan hal tersebut berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2022 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional adalah 5 rekomendasi, yaitu: (i) bahan ajar PIP PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi; (ii) revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) terkait mata pelajaran wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia; (iii) rekomendasi hasil pengukuran IAP; (iv) RUU BPIP; dan (v) rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaran, ormas yang terindikasi menentang ideologi Pancasila.

Sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah upaya memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, efektivitas kinerja kelembagaan baik secara kinerja organisasi dan kinerja keuangan, maupun dalam kerangka pengawasan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Ukuran keberhasilan sasaran strategis ini tergambar dari capaian, yaitu: nilai reformasi birokrasi, indeks sistem merit, opini LK oleh BPK, nilai SAKIP, nilai profesionalisme ASN, dan indeks kepuasan masyarakat.

Dari sisi kinerja anggaran menunjukkan hasil memuaskan. Hingga akhir periode Tahun 2022, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022 realisasi anggaran BPIP adalah 95,88% atau sebesar Rp308.446.284.679,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2022 sebesar Rp321.690.623.000,00. Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2022:



REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai Dasar Negara (*Philosophischegrondslaag*) sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus terus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan para pendiri bangsa tersebut pada dasarnya merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keddidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan PIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Peran tersebut melekat pada BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BPIP sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas

merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPIP atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BPIP. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPIP, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPIP.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. 1 Rapat Dengar Pendapat DPR RI September 2022

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, kedudukan, tugas, fungsi, dan pemangku kepentingan BPIP adalah sebagai berikut:

I. Kedudukan

BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia

II. Tugas

merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

III. Fungsi

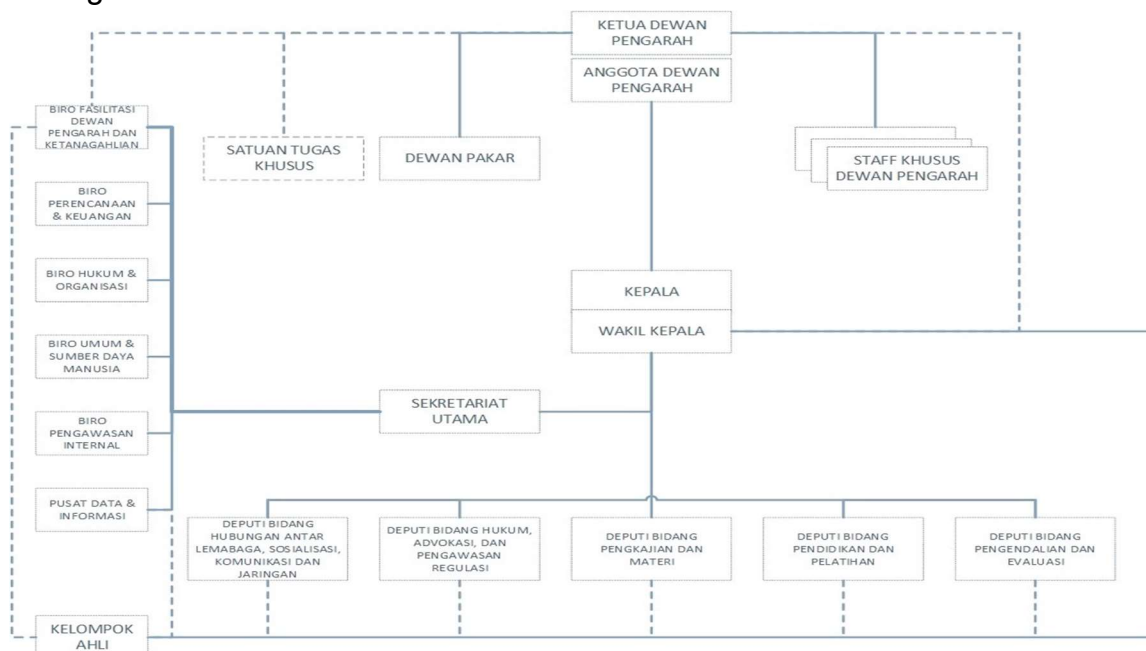
1. perumusan arah kebijakan PIP;
2. penyusunan peta jalan PIP;
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. pengaturan PIP;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
7. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. penyusunan standardisasi Diklat Pancasila serta menyelenggarakan Diklat;
11. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

IV. Pemangku Kepentingan:

- a) lembaga tinggi negara,
- b) kementerian/Lembaga,
- c) pemerintahan daerah,
- d) organisasi sosial politik, dan
- e) komponen masyarakat lainnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPPI nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah sebagai berikut :



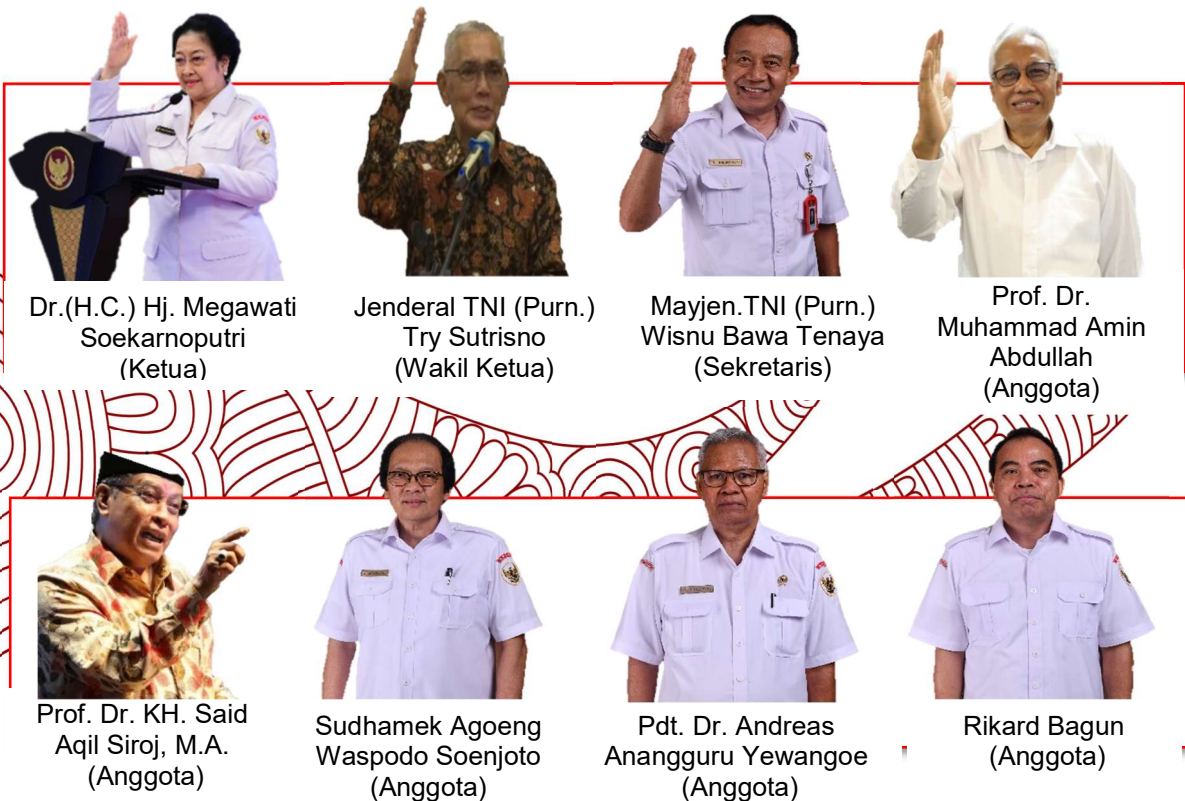
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPPI

Sebaran sumber daya manusia pada unit organisasi di lingkungan BPPI adalah sebagai berikut.

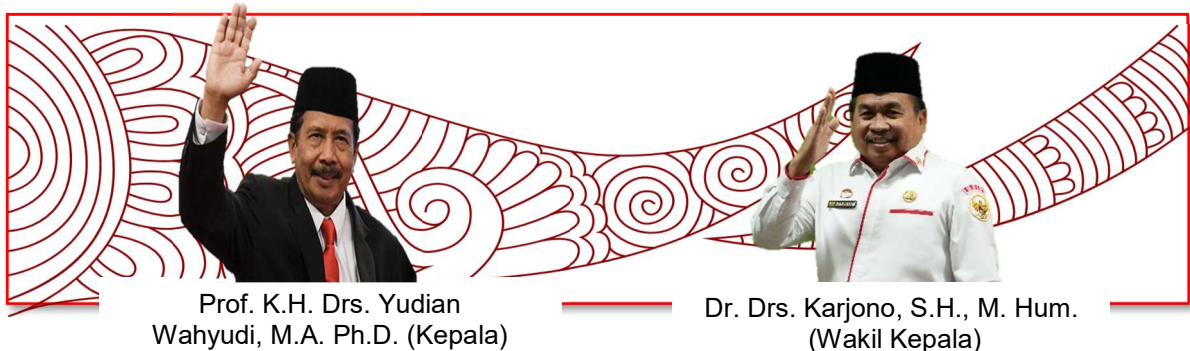
Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPPI

No	Unit Kerja	Jumlah									
		Kepala Waka	JPT Madya	Staf khusus	Dewan Pakar	JPT Pratama	Administrator	Pengawas	Pelaksana	PTT	Total
1	Kepala Dan Wakil Kepala	2									2
2	Sekretariat Utama		1			6					7
3	Deputi I		1			3					4
4	Deputi II		1			3					4
5	Deputi III					3					3
6	Deputi IV					3					3
7	Deputi V		1			2					3
8	Staf Khusus			3							3
9	Dewan Pakar				2						2
	Jumlah	2	4	3	2	20	56	36	132	110	365

Dewan Pengarah BPiP:



Kepala dan Wakil Kepala BPiP



Unit Eselon I:

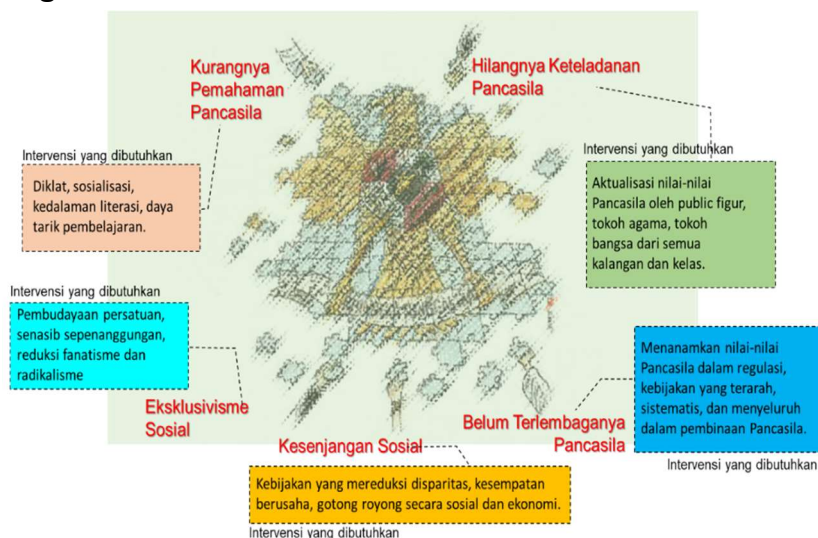


C. Aspek Strategis

Arah kebijakan dan strategi PIP dalam RPJMN 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi BPIP, yaitu:

- PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
- peningkatan peran dan fungsi BPIP sebagai perumus kebijakan umum PIP;
- harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
- membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

D. Isu Strategis



Gambar 1. 3 Isu Strategis BPIP

Aktualisasi nilai-nilai pancasila menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni: ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, maka gatra yang paling rawan adalah gatra ideologi.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan ketahanan ideologi, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman Pancasila,
2. Terjadinya eksklusivisme social,
3. Masih tingginya kesenjangan social,
4. Belum terlembaganya Pancasila, dan
5. Belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila

Tugas BPIP memang tidak mudah di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran BPIP merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha PIP secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) bab. Bab I pendahuluan menjelaskan antara lain: latar belakang eksistensi Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar berdirinya BPIP. Selanjutnya adalah kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Bab II adalah potret rencana kerja BPIP TA 2022. Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan, informasi kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan PIP yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang secara sistematis diukur dan dikelola. Bab III capaian strategis Tahun 2022 akan menjelaskan capaian-capaian BPIP selama Tahun 2022. Capaian yang dijelaskan meliputi capaian sasaran dan indikator kinerja utama strategis. Skema penjelasan capaian strategis pada bab ini adalah setiap sasaran strategis didukung oleh sasaran program beserta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sasaran program tersebut dan juga kinerja anggaran menjelaskan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran. Bab IV Sebagai Penutup Laporan.



PROSES PENGIBARAN BENDERA OLEH PASKIRRAKA NASIONAL



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 atau disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

RPJMN 2020-2024 TERKAIT PIP

VISI

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

ARAHAN

Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

AGENDA PEMBANGUNAN

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Lingkungan & Isu Strategis :

1. Melemahnya **ideologi Pancasila** dan ketahanan budaya bangsa
2. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
3. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
4. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
5. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
6. Belum optimalnya peran keluarga
7. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Arah Kebijakan dan Strategi:

Revolusi mental dan **pembinaan ideologi Pancasila** untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, melalui:

Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, mencakup:

- a) **Pembinaan ideologi Pancasila**, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
- b) **peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)** sebagai perumus kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- c) **harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila**;
- d) **membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara**.

Gambar 2. 1 RPJMN 2020-2024 Terkait PIP

Pancasila sebagai Dasar Negara (Philosophischegrondslaag) sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus terus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan para pendiri bangsa tersebut pada dasarnya merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. BPIP bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi PIP. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Rencana Strategis BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal. Rencana strategis BPIP 2020-2024 dituangkan dalam

Peraturan BPIP nomor 1 Tahun 2020. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPIP adalah sebagai berikut:

VISI:

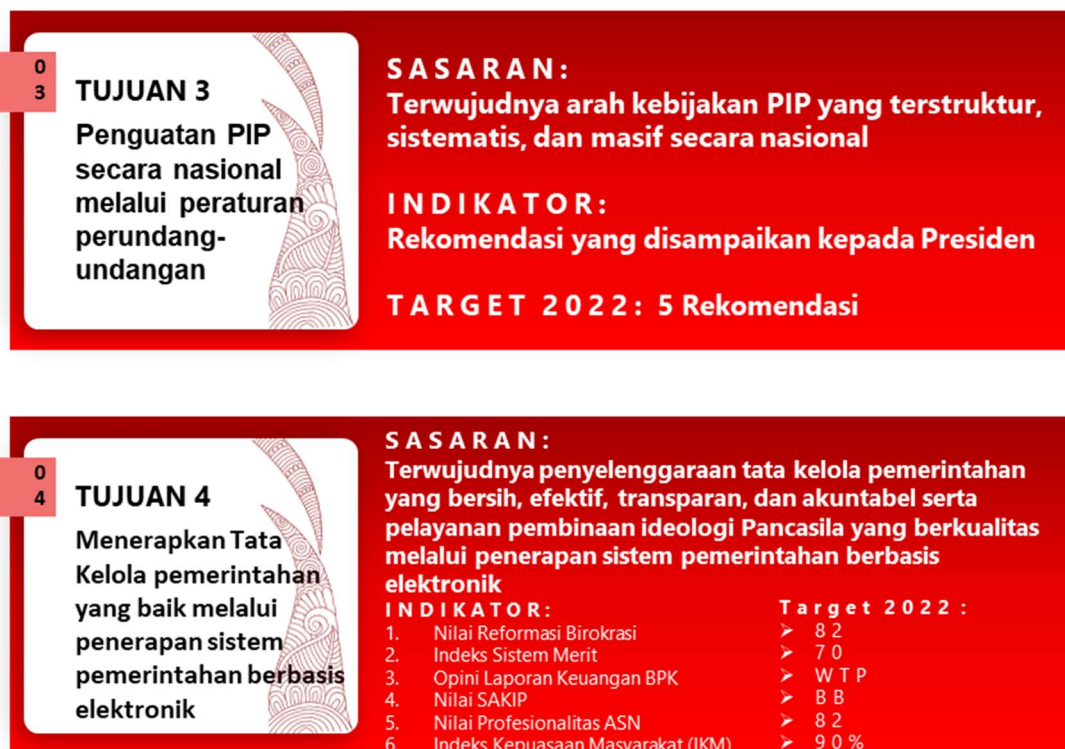
BPIP yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden di bidang PIP untuk mewujudkan visi dan misi Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandasan Gotong Royong”.

MISI :

BPIP mewujudkan misi Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi PIP sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, BPIP telah menetapkan 4 (empat) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mencerminkan outcome BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan BPIP. Tujuan, Sasaran, Ukuran Keberhasilan BPIP pada Renstra BPIP disajikan pada gambar sebagai berikut:

01 TUJUAN 1 Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	SASARAN : Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara INDIKATOR : Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) TARGET 2022 : 71
02 TUJUAN 2 BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda	SASARAN : Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda INDIKATOR : Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP TARGET 2022 : 60 %



Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2020-2024

B. Rencana Kerja

Total Alokasi pagu DIPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp321.690.623.000.

Alokasi DIPA TA 2022 diperuntukan mendukung pelaksanaan 2 program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp158.053.404.000,00;
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya, sebesar Rp163.637.219.000,00.

Rincian rencana kerja kedua program tersebut adalah

Tabel 2.1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2022

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
Program PIP		158.053.404.000
1.	Penguatan Sinergi Antar Lembaga yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi	6.303.261.000
2.	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan	85.030.711.000

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
	Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	
3.	Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	8.179.740.000
4.	Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila	3.881.597.000
5.	Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3.300.750.000
6.	Pelaksanaan Internalisasi, Institusionalisasi Pancasila dan Regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	3.493.591.000
7.	Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.651.945.000
8.	Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran bagi Aparatur Negara	2.404.676.000
9.	Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal PIP	4.910.799.000
10.	Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP	2.083.228.000
11.	Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP	3.149.090.000
12.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	9.151.770.000
13.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	17.673.221.000
14.	Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	4.839.025.000

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya		163,637,219,000
1.	Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	4.800.000.000
2.	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	3.122.994.000
3.	Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan	133.793.573.000
4.	Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	3.900.000.000
5.	Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	9.790.533.000
6.	Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	8.230.119.000
Jumlah		321.690.623.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Melaksanakan mandat merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, BPIP menetapkan 4 sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPIP.

Sasaran strategis BPIP mendukung Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2022 berisi langkah-langkah strategis tahunan dari lima tahun strategi dalam rencana strategis Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut ini:



Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Target
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai indeks Aktualisasi Pancasila	71
Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	60%
Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis dan masif secara nasional	Rekomendasi arah kebijakan yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	82
	Indeks Sistem Merit	70
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Nilai Profesionalisme ASN	82
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan acuan ukuran kinerja.

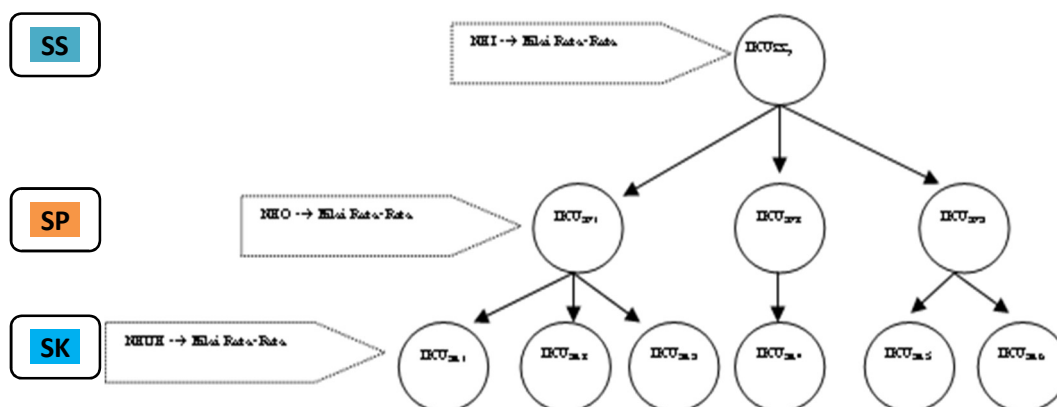


Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan

Ruang lingkup Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pengumpulan data kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Badan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja melakukan koordinasi pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengumpulan dan penyampaian laporan data kinerja pada masing-masing tingkatan dan unit kerja dikoordinasikan oleh: (i) KPIs Manager tingkat BPIP, (ii) KPIs Manager tingkat Organisasi (eselon I), dan (iii) Koordinator Capaian IKU pada tingkat Unit Kerja (eselon II). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; dan/atau
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.
3. Penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan cascading indikator kinerja, yaitu:
 - a. Nilai Kinerja Unit Kinerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon II.

- b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon I.
- c. Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja BPIP.



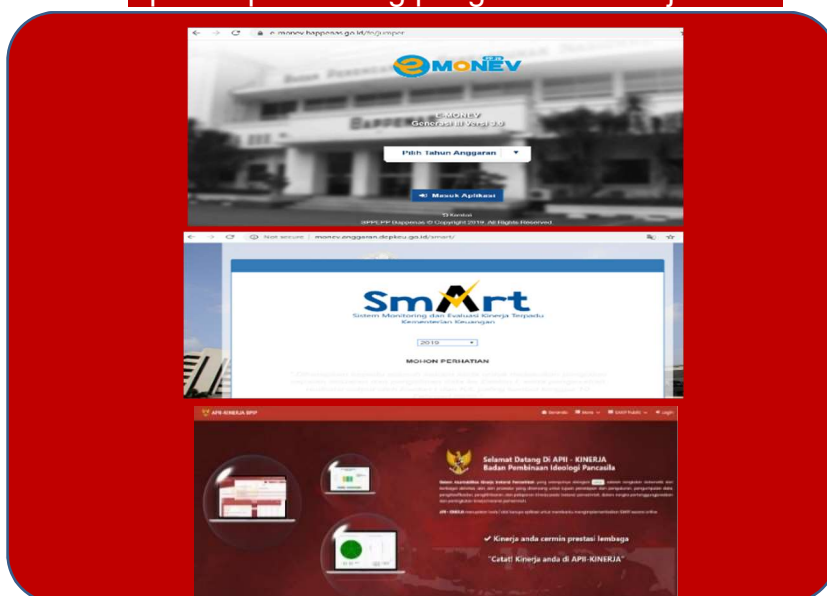
Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja

Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP, antara lain adalah:

Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP

Warna	Hijau	Kuning	Merah
Capaian	$n \geq 100$	$80 \leq n < 100$	$n < 80$
Interpretasi	Baik	Cukup	Kurang

Aplikasi pendukung pengelolaan kinerja BPIP:



GAMBAR 1 APLIKASI PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA BPIP

Hasil monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan. Laporan triwulanan tahun 2022 seperti berikut:



Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



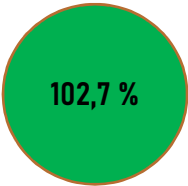
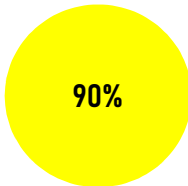
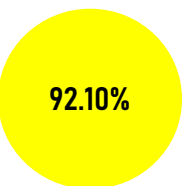
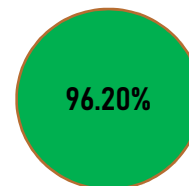
PELAKSANAAN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA DI KABUPATEN ENDE

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPIP tahun 2022 dilakukan dengan cara mengukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan rerata nilai kinerja dari IKU BPIP maka diperoleh data Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP adalah sebesar 96,20%. Kinerja BPIP sampai dengan Desember 2022 mencapai kategori baik. Capaian kinerja BPIP tahun 2022 ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2022

				
IKU_{SS1} Nilai IAP	IKU_{SS2} Persentase Institusionalisasi PIP	IKU_{SS3} Rekomendasi kepada Presiden	IKU_{SS4} Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Kinerja Instansi (NKI)

Nilai Kinerja Instansi (NKI) tahun 2022 adalah sebesar 96,20 % secara keseluruhan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2022

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)/ INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)	IKU			BOBOT	INDEKS CAPAIAN IKU
		Target	Realisasi	Capaian		
SS.1	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara				25%	25,68%
IKU.1	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	71	72.93	102,71%	25%	25,68%

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)/ INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)	IKU			BOBOT	INDEKS CAPAIAN IKU
		Target	Realisasi	Capaian		
SS.2	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda				25%	25%
IKU.2	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	60% (72 K/L)	60% (72 K/L)	100%	25%	25%
SS.3	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional				25%	23%
IKU.3	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rek	5 Rek	90%	25%	23%
SS.4	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik				25%	23,04%
IKU.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi	82	80,13 (mandiri)	97,71%	4,17%	4,07%
IKU.4.2	Indeks Sistem Merit	0.70	0.66	94%	4,17%	3,92%
IKU.4.3	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	4,17%	4,17%
IKU.4.4	Nilai SAKIP	BB	BB (mandiri)	100%	4,17%	4,17%
IKU.4.5	Nilai Profesionalisme ASN	82	51,03	62%	4,17%	2,59%
IKU.4.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	89.12	99%	4,17%	4,13%
NILAI KINERJA INSTANSI						96,20%

Adapun capaian kinerja utama BPIP tahun 2022 yang diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Ukuran keberhasilan Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2022 adalah:

Tabel 3. 4 IKU Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	71	72.93 (proksi)

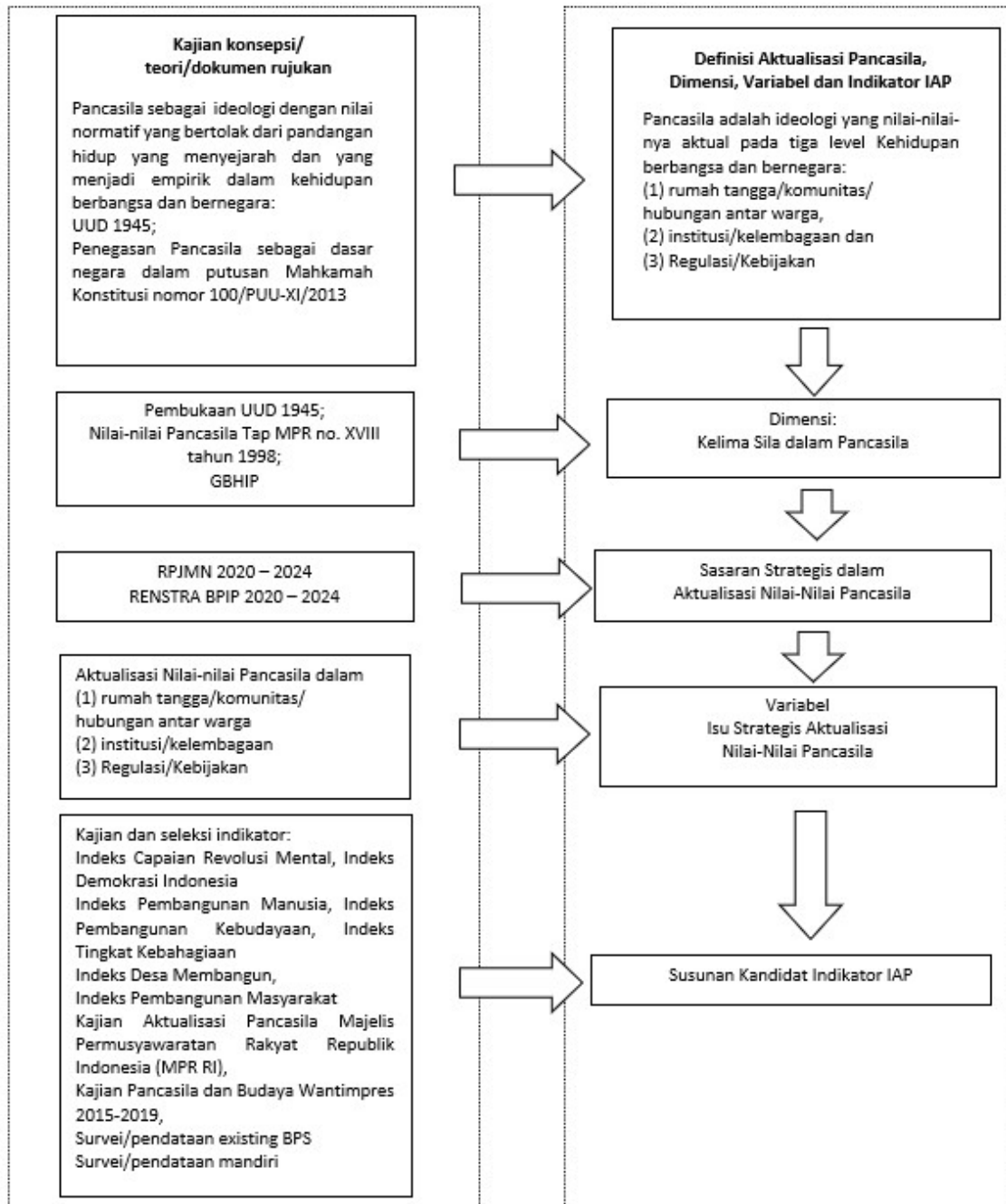
Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai situasi dan kondisi terkini pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan tersebut akan dilihat dari aspek realisasi nilai dan persepsi yang akan dibuat dalam bentuk indeks. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP akan secara operasional didefinisikan sebagai: Ideologi yang nilai-nilai-nya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) regulasi/kebijakan.

Dalam lingkup rumah tangga/komunitas/hubungan antar warga, kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dicermati dalam hubungan dan interaksi antar warga, bagaimana “merdeka-bersatu-berdaulat-adil-makmur” diperjuangkan. (Hubungan antar warga ini juga dinilai dalam bandingannya dengan beberapa pengukuran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, dengan berbagai konsep, istilah, dan kualifikasi).

Dalam lingkup kelembagaan negara, upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dicermati dalam struktur, kepemimpinan dan pelayanan sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam regulasi/kebijakan (produk dan proses), upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dicermati dalam regulasi dimana kemaslahatan- kebahagiaan bersama (*al-masalahah al-ammah, bonum commune*) diperjuangkan dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk.

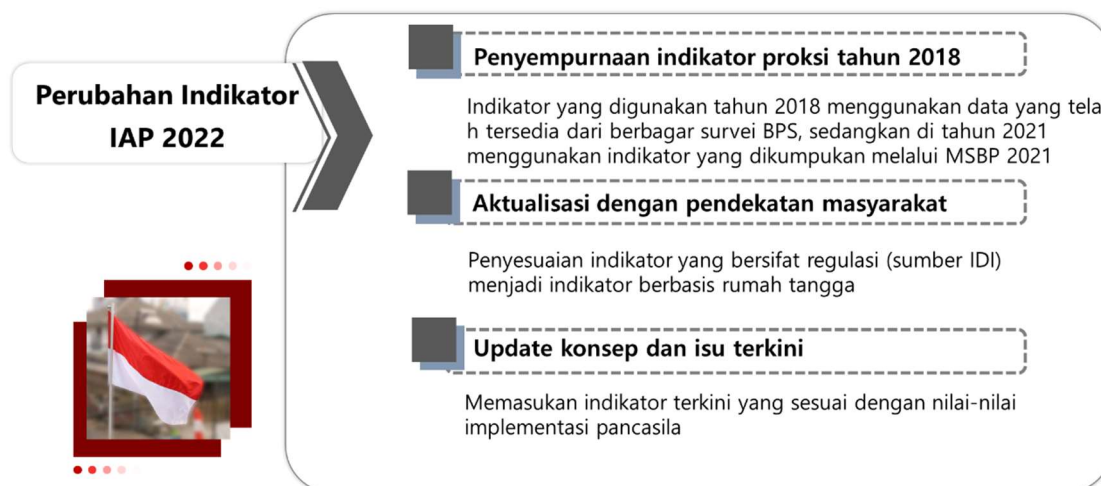


Dalam regulasi/kebijakan (produk dan proses), upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dicermati dalam regulasi dimana kemaslahatan-kebahagiaan bersama (*al-masalah al-ammah, bonum commune*) diperjuangkan dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk



Gambar 3. 1 Sistematika Kajian Konsepsi dan Dokumen Rujukan Aktualisasi Pancasila

Dalam penyusunannya terdapat perubahan Indikator IAP Tahun 2022 dimana adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Perubabahan Indikator IAP

Secara garis besar, proses penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) terdiri dari: pemetaan indikator kandidat penyusun IAP, proses seleksi indikator, penyiapan data, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap sila, penghitungan indeks per sila, dan penghitungan IAP.



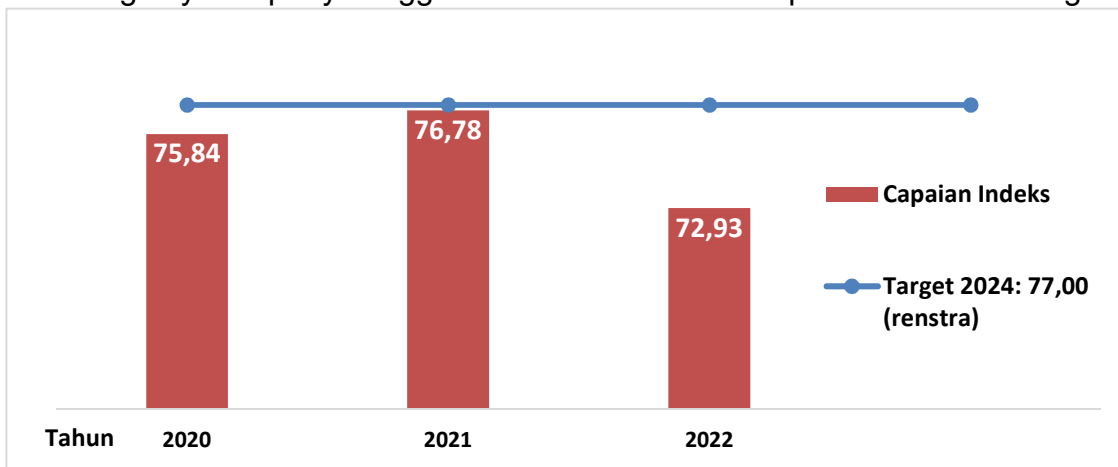
Gambar 3. 3 Tahapan Perhitungan IAP

Penghitungan IAP bertujuan untuk mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, disusun atas lima dimensi dan 23 indikator. Setiap dimensi mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai setiap Sila pada Pancasila, yang diterapkan di tengah masyarakat. Setiap indikator dipilih berdasarkan kajian konsepsi dan rujukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Renstra BPIP 2020-2024, ketersediaan data di BPS, serta uji publik dengan para ahli. Berikut akan dijelaskan hasil penghitungan capaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia.

Nilai IAP tahun 2022 adalah hasil dari survei aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan sepanjang periode tahun 2021, dimana terjadi penurunan nilai. Gambar 3.4 di bawah ini memperlihatkan nilai IAP tahun 2022 sebesar 72,93, menurun dari 76,78 pada tahun 2021 dan 75,84 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan penurunan pengamalan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dikarenakan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran COVID-19, sehingga pergerakan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhambat. Dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 77,00, jika melihat nilai IAP tahun 2022 kurang sebesar 4,07 poin.

Adapun untuk mencapai IKU tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan strategis yaitu penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan PIP dengan



Gambar 3. 4 Capaian Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Tahun 2020-2022

jumlah peserta sebanyak 3.173 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan PIP Untuk Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 83 orang;
2. Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Guru Dayah dan Widyaiswara Meulaboh, dengan peserta sebanyak 44 orang;
3. Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Pengurus FKUB Kabupaten Ende, dengan peserta sebanyak 100 orang;
4. Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Orsospol di Makasar, dengan peserta sebanyak 140 orang;

5. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk komponen masyarakat lain di Sampang Madura, dengan peserta sebanyak 100 orang;
6. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk Komunitas Lingkungan di Jogja, dengan peserta sebanyak 100 orang;
7. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk Organisasi Kemahasiswaan di Jogja, dengan peserta sebanyak 200 orang;
8. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk ASN di Kupang, dengan peserta sebanyak 140 orang;
9. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk Paskibraka Nasional, dengan peserta sebanyak 68 orang;
10. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk Paskibraka Daerah, dengan peserta sebanyak 668 orang;
11. Pembekalan PIP untuk Purnapaskibraka, dengan peserta sebanyak 1.000 orang;
12. Pembekalan PIP untuk Milenial di Bali, dengan peserta sebanyak 140 orang;
13. Pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Pendidikan dan Pelatihan Guru Pancasila, dengan peserta sebanyak 100 orang;
14. Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi TNI/POLRI, dengan peserta sebanyak 108 orang;
15. Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk ASN di Kupang, dengan peserta sebanyak 140 orang;
16. Pembekalan PIP untuk Purna Paskibraka di Bengkulu, dengan peserta sebanyak 42 orang.

Keberhasilan penyelenggaraan diklat ini disebabkan antara lain telah terdapat Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan BPIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan juga Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Juga tersedianya Petunjuk Teknis dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila antara lain Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan 7 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar Diklat PIP, masing-masing bagi Aparatur Negara Berjenjang Tingkat Dasar, Aparatur Negara Berjenjang Tingkat Menengah, Aparatur Negara Berjenjang Tingkat Utama, Organisasi Sosial Politik Berjenjang Tingkat Dasar, Organisasi Sosial

Politik Berjenjang Tingkat Menengah, Organisasi Sosial Politik Berjenjang Tingkat Utama, Organisasi Sosial Politik dan 7 Petunjuk Teknis Diklat PIP Purnapaskibraka yaitu Petunjuk Teknis Pemusatan Paskibraka, Juknis Diklat PIP Tingkat Dasar bagi Aparatur Negara, Juknis Diklat PIP Tingkat Menengah bagi Aparatur Negara, Juknis Diklat PIP Tingkat Dasar bagi Orsospol, Juknis Diklat PIP Tingkat Menengah bagi Orsospol, dan Juknis Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya; tersedianya Modul Diklat PIP bagi Pendidikan Informal, Modul diklat PIP bagi Pendidikan Formal, Modul PIP bagi Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Petunjuk Teknis PIP Pemusatan bagi Paskibraka dan Petunjuk Teknis Diklat PIP bagi Purnapaskibraka yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP dan Diklat PIP.

Diklat PIP merupakan Diklat yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar. Penyampaian materi lebih bersifat interaktif dan native sehingga perlu adanya media tatap-muka langsung dan aktivitas lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, khususnya penyelenggaraan Diklat masih terdapat banyak tantangan dan ruang untuk pengembangan. Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, pemenuhan standar dan kurikulum pelaksanaan dan Pendidikan PIP, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang terstandar, serta pemberian kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP, sehingga dalam pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan PIP memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inklusivisme social, pelebagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila bagi seluruh anak bangsa, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda

Menjadi Koordinator dalam Pelebagaan PIP merupakan salah satu kunci dalam membumikan kembali pembinaan Ideologi Pancasila di bumi nusantara untuk menguatkan kembali ketahanan sosial politik, ekonomi, budaya. Ukuran keberhasilan Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda tahun 2022 adalah:

Tabel 3. 5 IKU Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	60 % (72 K/L/Komunitas)	60% (72 K/L/Komunitas)

Institusionalisasi adalah proses suatu norma yang dilewati oleh masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga di kenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya adalah K/L/Instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Persentase diukur dari jumlah institusionalisasi yang berhasil, dibandingkan dengan seluruh berbagai upaya institusionalisasi yang dikoordinasikan oleh BPIP.

Berikut adalah kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan dituangkan dalam 2 tabel yang berbeda yaitu tabel tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah, dan tabel tindak lanjut kerja sama dengan Orsospol, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga:

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Kemenkumham	Kajian dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Wilayah I	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang BPIP	
		Penyelarasan rancangan peraturan badan BPIP tentang analisis dan sinkronisasi, kajian dan rekomendasi	
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bangka Belitung	
		Strategi Implementasi Nilai Pancasila terhadap Peraturan Daerah di Semarang)	
		Harmonisasi Peraturan PKPU	
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di NTT	

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Manado	
		Internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila di tanjung pinang	
		Melakukan sosialisasi bersama dengan kepada warga binaan	Deputi HALSKJ
		Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP bagi Purnapaskibraka.	
2.	Kemendagri	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Kajian dan Analisis Peraturan Daerah yang bertentangan dengan NilaiNilai Pancasila sudah berjalan	
		penentuan Indikator Pancasila bersama Direktorat Produk Hukum Kemendagri	
		MoU sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		MoU sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS	
		Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur PIP di lingkungan ASN	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rakor Pengendalian PIP bersama Bakesbangpol daerah Sumatera secara daring	
		Rakor Pengendalian PIP bersama Bakesbangpol daerah Jawa secara daring	
		Pelaksanaan koordinasi Gotong Royong Pembumian Pancasila bersama Badan Kesbangpol 34 Provinsi di Indonesia, dan Talk Show Nasional.Is.Me Goes to Campus	Deputi HALSKJ
		Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pekan Hari Lahir Pancasila, sarasehan Nasional dalam bentuk webinar.	
		Melakukan kegiatan bersama dalam bentuk FGD terkait penyebarluasan Peraturan Kementerian dalam Negeri maupun BNPP dengan melibatkan semua unsur SKPD di daera	
3.	BNPP	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Wilayah 1	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Wilayah 2	
		Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Sambas	
4.	BKKBN	Diklat PIP Bagi Pendongeng, Youtuber, dan Influencer, Ada peserta 30 org, 9-13 Desember 2019 diklat PIP dengan Genre BKKBN	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga di karawang	Deputi HALSKJ
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga di Semarang	

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, dan Influencer diklat PIP dengan Genre BKKBN	
		Webinar Sosialisasi Pancasila di lingkungan BKKBN	
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga	
		Generasi pembudayaan nilai Pancasila, penanaman nilai sebagai pola dan pembentukan strategi keluarga Pancasila	
5.	BNPT	Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur di lingkungan Pendidikan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rapat Lanjutan antar K/L dalam rangka pengendalian PIP	
		Rapat Terbatas pimpinan tingkat tinggi Kementerian Lembaga	
		Koordinasi pelaksanaan pengendalian PIP di Sumut	
		Munas Komunitas Pemantapan PIP melalui giat Purna Paskibraka Indonesia	
		Pengendalian PIP melalui Diskusi Kiat-Kiat Positif mengisi ruang publik dengan konten positif	
		Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek	
		Kegiatan Pembekalan Deteksi Dini Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia	
		DKT Pengendalian Intoleransi di kalangan pelajar dengan tema "Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan ekstrimisme"	
6.	Lemhannas	Diskusi Belanja masalah penyusunan alat ukur PIP di lingkungan Pendidikan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Ibu Rima sebagai Narsum PPRA Lemhanas RI	
		Rapat Lanjutan antar K/L dalam rangka pengendalian PIP (High Level Meeting)	
		Rapat Terbatas pimpinan tingkat tinggi Kementerian Lembaga	
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi PIP Segmen ASN	
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila NTT	
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
		Munas BUMN Pemantapan PIP dengan BUMN	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila	
7.	Kemenag	DKT Pembahasan Materi Relasi Lintas Iman dalam Bingkai Pancasila dalam rangka penguatan Kebijakan Moderasi Beragama dan Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama di Indonesia	Deputi Pengkajian dan Materi

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila Bersama Komunitas Agama, Komunitas Lingkungan, Komunitas Adat, dan Komunitas Seni	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan "Strategi Pembumih Nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat sebagai Langkah Pengendalian PIP"	
8.	KemendesPDTT	Webinar Pertemuan Nasional Kepala Desa "Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa"	Deputi HALSKJ
		Pertemuan Nasional Kepala Desa "Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa"	
		"Ngobrol Pancasila di Desa" Desa Pancasila dan Pasar Gotong Royong di Desa Karungan dan Pasar Bahulak Kabupaten Sragen Jawa Tengah	
9.	KPU	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan KPU;	Deputi Hukum dan Advokasi
		Kajian dan analisis terhadap persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten/kota;	
		Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan "Demokrasi Pemilu dan Partisipasi"	Wakil Kepala BPIP
		Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan "Demokrasi Pemilu dan Partisipasi"	Deputi HALSKJ
10.	KPK, BNN, BNPT	webinar kolaborasi antara BNPT, BNN, KPK dan BPIP bekerjasama dengan Univ Singaperbangsa Karawang	Deputi Pengkajian dan Materi
11.	ANRI	Akseptasi Dokumen Sejarah Republik Indonesia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Revisi Risalah Sidang BPUPK	Deputi Pengkajian dan Materi
12.	DPR	Melakukan sosialisasi kepada kaum melenial	Deputi HALSKJ
		Melakukan penguatan kepada anggota Dewan di tingkat Provinsi/Kota	
		Penelaahan terhadap produk hukum yang akan diundangkan	

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
13	Kominfo	Workshop Simulasi Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMI) Pendidikan dan Pelatihan PIP	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Pembuatan perpustakaan Pancasila di lapas lapas di berbagai Provinsi.	
14	Kemen-dikbudristek	Optimalisasi Penguatan Pancasila dalam RUU Sisdiknas dan Implemenrasi Buku Pancasila dan Forum Group Diskusi dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Lingkup Pendidikan Formal	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
15	Kemendagri dan BNPP	Melakukan kegiatan bersama dalam bentuk FGD terkait penyebarluasan Peraturan Kementerian dalam Negeri maupun BNPP dengan melibatkan semua unsur SKPD di daerah	Deputi HALSKJ
16	Kota Palu	Kegiatan diskusi kelompok terpumpun ke Provinsi hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila di kota Palu provinsi Sulawesi Tengah	Deputi HALSKJ
17	Pemerintah Provinsi Aceh	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP bagi Guru Dayah, Pengurus FKUB, serta Widyaiswara.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Melaksanakan pendidikan dan latihan PIP kepada Tokoh Masyarakat	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
19	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pembukaan Perpustakaan yang bernuansakan pancasila	Deputi HALSKJ
20	Pemerintah Kota Kupang	Pendidikan dan pelatihan kepada ASN di Kota Kupang	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
21	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah di Wilayah Tengah	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
22	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Kegiatan institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah di Wilayah Barat	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
23	Pemerintah Kota Yogyakarta	Diskusi kelompok terpumpun penyusunan arah kebijakan internalissai dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Pendalaman Muatan Materi Draf Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi Pengawasan Regulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	
24	Pemerintah Provinsi Bali	Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelarasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
25	DPRD Kabupaten Magelang	Konsultasi DPRD Kabupaten Magelang Bersama BPIP terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
26	Pemerintah Provinsi Jambi	Konsultasi DPRD Provinsi Jambi Bersama BPIP terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
27	Pemerintah Kota Medan	Internalisasi Indikator Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
28	Pemerintah Kota Solo	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah dan Finalisasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang, Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Solo	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
29	Pemerintah Provinsi Maluku	Internalisasi Indikator Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
30	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Universitas Merdeka Malang dan DPRD Kab Banyuwangi	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
31	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
32	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Internalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
33	Di Provinsi Papua Barat	Koordinasi Kajian Implementasi PIP Di Provinsi Papua Barat	Deputi Pengkajian dan Materi
34	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Penyusunan Strategi Pengendalian PIP dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Perilaku Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
35	Pemerintah Kota Balikpapan	Evaluasi PIP melalui Seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Kota Balikpapan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
36	Pemerintah Lampung Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	UNDIP	Penyusunan buku "Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila"	Deputi Pengkajian dan Materi
		Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi (November 2019)	
2	TVRI	Program Indonesia Bicara	Deputi HALSKJ
		Program Indonesia Damai	
		Dialog dan Siaran Langsung Hari Lahir Pancasila	
		Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Ende	
3	UGM, UIN SUNAN KALIJAGA DAN INFID	Penyusunan buku "Ketuhanan dalam bingkai Pancasila Perspektif Lintas Iman"	Deputi Pengkajian dan Materi
		Penyusunan Buku "SIGMA PANCASILA: Mengenyam Kepelebagaian, Meneguhkan Keindonesiaan"	
		Pelaksanaan Simposium Nasional Studi Ekonomi Berparadigma Pancasila	
		Call for Paper Simposium Nasional Studi Ekonomi Berparadigma Pancasila	
		Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
4	KPOTI	Pemodelan Pengendalian di Kep.Seribu melalui Permainan Tradisional	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda	
		Munas Komunitas pemantapan PIP melalui giat komunitas seluruh Indonesia	
		Munas Pemantapan PIP melalui Giat Permainan Tradisional Indonesia	
		Pancasila Dalam Tindakan "Belajar Pancasila Melalui Dongeng dan Permainan Tradisional"	
		Dialog "Tetap Sehat, Bahagia dan Berbudaya di Rumah Melalui Permainan Tradisional"	
		Webinar menanamkan nilai moral dan karakter anak melalui dongeng dan permainan tradisional	
		DKT Pengendalian PIP Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di bidang Kebudayaan bersama Ormas	
		Webinar Umkm Dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila Di Masa Pandemi Covid-19	
		Perkenalan Pancamain Indonesia	
		Webinar Strategi Mempopulerkan Permainan Tradisional	
		Finalisasi Pancamain Indonesia	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Refleksi Hari Sumpah Pemuda Peran Pemuda dalam menjaga Persatuan Indonesia pada kondisi pandemi sebagai wujud Pancasila dalam Tindakan Gotong Royong	
		Finalisasi Pancamain Indonesia	
		Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek	
		Belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia	
		Ekonomi Pancasila Berbasis Komunitas di Era Digitalisasi	
		Diskusi "Model Ekonomi Berbasiskan Kearifan Lokal"	
		Launching Pancamain Indonesia	
		Koordinasi dengan Kab Gianyar dalam pengembangan produk Pancamain Indonesia	
		Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian PIP melalui Sosialisasi Pancamain Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan	
		Pembinaan KPOTI Pengembangan Produk Pancamain Indonesia Sebagai Alat Pengendalian PIP	
		Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila Bersama Komunitas Agama, Komunitas Lingkungan, Komunitas Adat, dan Komunitas Seni	
		Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
		Peninjauan Kampung Pancasila	
		Webinar Pengenalan Pancamain Indonesia Kepada Tenaga Pendidik	
		KOTI menjadi peserta dalam kegiatan Diskusi Grup Terpumpun pembahasan Diklat PIP Bagi Komponen Masyarakat Lainnya	Direalisasikan oleh Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Belum Terealisasi	
5	PPI	Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Pancasila Dalam Tindakan Melalui Diskusi Bersama PPI Dalam Memperingati Hari Kartini	
		Webinar Umkm Dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila Di Masa Pandemi Covid-19	
		Pembekalan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Paskibraka Tahun 2020	
		Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Sambas	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		PIP Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda II Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur PIP di lingkungan Pemuda Munas Komuitas Pemantapan PIP melalui giat Purna Paskibraka Indonesia Upacara peringatan sumpah pemuda bersama PPI <i>Presidential Lecturer</i> dengan mahasiswa sejabodetabek Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila Kalimantan Barat Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila Sulawesi Barat Pancasila dalam tindakan Webinar peringatan hari Kartini "Kartini Muda" produktif berkarya ditengah Pandemi Pengendalian PIP melalui Diskusi Kiat-Kiat Positif mengisi ruang publik dengan konten positif DKT Pengendalian PIP Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di bidang Kebudayaan bersama Ormas Rapat Pembahasan PIP Generasi Muda melalui Program Paskibraka Refleksi Hari Sumpah Pemuda Peran Pemuda dalam menjaga Persatuan Indonesia pada kondisi pandemi sebagai wujud Pancasila dalam Tindakan Gotong Royong Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek Rapat Pembahasan rekrutmen calon Paskibraka Workshop Digital Culture dengan tema "Peran Aktif Purna Paskibraka Indonesia dalam rangka Membangun Karakter Bangsa di Era Digital" Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Pemuda Pemudi Panutan Pancasila Rapat Persiapan Pelaksanaan PIP Kepada Generasi Muda Melalui Program Paskibraka Kelas PIP pada Pelatihan Public Speaking bersama Siberkreasi dan KOMINFO	
6	Universitas Udayana	Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur di lingkungan Pendidikan Pengendalian PIP dan Pembahasan Penyusunan Alat ukur di Bali Diskusi Kelompok Terpumpun Aktualisasi Pancasila dalam dunia pendidikan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi segmen Pendidikan	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP (Desember 2019)	
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
7	Universitas Indonesia	Terealisasi Dosen dari Universitas Indonesia menjadi peserta dan narasumber dalam kegiatan Diskusi Grup Terpumpun focus Komponen Masyarakat Lainnya	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Terealisasi Dosen dari Universitas Indonesia menjadi peserta dan narasumber dalam kegiatan Diskusi Grup Terpumpun focus Komponen Masyarakat Lainnya	
8	Universitas Gadjah Mada	Koordinasi Pengendalian PIP dengan Pusat Kajian Pancasila Yogyakarta	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi di lingkungan Pemuda	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
		Koordinasi Pengendalian PIP dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM	
9	Universitas Negeri Semarang	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
		Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila	
10	Universitas Negeri Makassar	Koordinasi Pengendalian PIP dalam rangka meminimalisir sikap intoleransi dan radikalisme	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
11	Universitas Negeri Jakarta	Webinar belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Webinar belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia dan Diskusi Kelompok Terpumpun/ Fgd "Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila"	
		Diskusi Kelompok Terpumpun/ Fgd "Standarisasi Pendidikan Dan Pelatihan PIP"	
12	Universitas Pertahanan	Diskusi Kelompok Terpumpun Peningkatan Kemitraan BPIP dengan Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya melalui Clearing House Rumah Gotong Royong	Deputi HALSKJ
13	Universitas Negeri Medan	Kegiatan Webinar Vol. 1 "Sinergi Mewujudkan Tenaga Pendidik Berkarakter Pancasila"	Deputi HALSKJ

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
14	Universitas Negeri Padang	“Koordinasi Standardisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal (Wilayah Barat)”	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Standarisasi Materi dan Bahan Ajar PIP Bagi Kepala Daerah	
		“Koordinasi Standardisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal (Wilayah Barat)” pada tanggal di Padang, Sumatera Barat; Penyusunan Standarisasi Materi dan Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Kepala Daerah	
		Kompetisi Pidato dan Karya Tulis Ilmiah yang melibatkan Tim BPIP sebagai Dewan Juri	
15	Universitas Pendidikan Indonesia	Penyusunan Standar Proses Pembelajaran Pancasila di Pendidikan Formal	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Kurikulum Pemusatan Program Paskibraka	
		Penyusunan Standar Bahan Ajar dan Metode PIP (PIP) Di Lingkungan Nonformal	Deputi Pengkajian dan Materi
16	Universitas Negeri Yogyakarta	Koordinasi awal BPIP Dengan PSP UGM dan Pspk UNY dalam rangka penyelenggaraan Diklat PIP	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
17	Universitas Negeri Surabaya	Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
18	IAIN Curup	Kuliah Umum Bagi Civitas Akademika IAIN Curup	Deputi HALSKJ
19	UIN Walisongo Semarang	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
20	ADKASI	Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring Evaluasi Kerjasama antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) & BPIP dengan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua	Deputi HALSKJ
		PKS antara Deputi Pengkajian dan Materi dengan ADKASI pada september	Deputi Pengkajian dan Materi
		Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh	
		Deputi 4 menjadi narasumber pada Rapat koordinasi dan diklat di Jakarta (Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia tanggal 15 s.d. 18 maret 2020)	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
21	UNI PAPUA	Kegiatan Persamuhan Nasional Pembakti Desa, Komunitas dan Jejaring di Anyer	Deputi HALSKJ
		sebagai peserta pada kegiatan Persamuhan Nasional Pendidik Pancasila : Narasi, Rasa, dan Laku Lampa	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		FGD pembahasan tindak lanjut kerjasama dengan PT. Balai Pustaka, Purnapakibraka (PPI), Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI) dan Perkumpulan Sepakbola Uni Papua	
		Pemberian apresiasi prestasi icon Pancasila	Dep Adv, Hukum dan Pengawasan Regulasi
22	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi Simposium Nasional Kebijakan Pancasila sebagai Weltanschauung bersinergi dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Deputi HALSKJ
23	Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia)	Deklarasi Pencanangan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional TTD MoU dan Talkshow Hasil Survei Nasional tentang Orientasi Publik terhadap Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
25	Cipayung Plus	Seminar Dalam Rangka Menyambut Hari Pahlawan, Dengan Tema, Pemuda Bicara "Menyongsong Indonesia 2045"	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
26	PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Perjanjian Kerjasama PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Deputi HALSKJ
27	RRI	Spesial Talkshow Pembinaan Ideologi Pancasila mewujudkan Generasi Muda Tanggung Indonesia Emas Dialog Interaktif: Deklarasi dan Rencana Aktualisasi Pancasila	Deputi HALSKJ
28	Jawa Pos Media Televisi (JTV)	Perjanjian Kerjasama Jawa Pos Media Televisi (JTV)	Deputi HALSKJ
29	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
30	RSUD Dr. Moewardi	Deklarasi RSUD Dr. Moewardi sebagai Benteng Pancasila dan Workshop Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Cinta Tanah Air	Dep Adv, Hukum dan Pengawasan Regulasi
31	Universitas Jember	Semarak Bulan Pancasila di Universitas Jember	Deputi HALSKJ
32	Univesitas Nahdlatul Ulama	Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Kuliah Umum Kebangsaan	Deputi HALSKJ
33	Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila dan Dialog Kebangsaan Implementasi UU Sisnas IPTEK: Penguatan Perguruan Tinggi Nasional Menuju Indonesia Emas	Deputi HALSKJ

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
34	IPDN	Evaluasi PIP melalui Seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Alumni IPDN dan Calon ASN Mahasiswa IPDN	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
35	UMKMI	Bingkai Pancasila	Dep Adv, Hukum dan Pengawasan Regulasi
36	KOMPAS	Seminar Pancasila Series	Deputi HALSKJ

Ruang lingkup institusionalisasi adalah hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi.

Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan Pembudayaan

Ruang Lingkup Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan kerja sama dalam pengarusutamaan PIP yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan berbagai stakeholder perlu dilakukan karena masih kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila dan belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila, sehingga apa yang diharapkan oleh negara terhadap BPIP untuk menjadi lembaga koordinator PIP dapat segera terwujud.

Kinerja BPIP dalam HAL dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila pada tahun 2022 ada sebanyak 112 Kerjasama baik Nota Kesepahaman, MoU, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani bersama antara BPIP dengan mitra kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 MoU & Perjanjian Kerjasama Pengarusutamaan Ideologi Pancasila

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
1	Badan Pusat Statistik	Nota Kesepahaman	PN
2	Deputi 1 - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT	Perjanjian Kerja Sama	PN
3	Provinsi Sumatera Utara	Nota Kesepahaman	PN

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
4	Kabupaten Asahan	Nota Kesepahaman	PN
5	Kabupaten Deli Serdang	Nota Kesepahaman	PN
6	Kabupaten Karo	Nota Kesepahaman	PN
7	Kabupaten Labuhan Batu	Nota Kesepahaman	PN
8	Kabupaten Padang Lawas Utara	Nota Kesepahaman	PN
9	Kabupaten Pakpak Bharat	Nota Kesepahaman	PN
10	Kabupaten Samosir	Nota Kesepahaman	PN
11	Kabupaten Simalungun	Nota Kesepahaman	PN
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Nota Kesepahaman	PN
13	Kabupaten Tapanuli Utara	Nota Kesepahaman	PN
14	Kabupaten Toba	Nota Kesepahaman	PN
15	Kota Binjai	Nota Kesepahaman	PN
16	Kota Medan	Nota Kesepahaman	PN
17	Batu Bara	Nota Kesepahaman	PN
18	DPRD Provinsi Lampung	Nota Kesepahaman	PN
19	Kabupaten Aceh Tamiang	Nota Kesepahaman	PN
20	Kota Metro, Lampung	Nota Kesepahaman	PN
21	Mahkamah Konstitusi (MK)	Nota Kesepahaman	PN
22	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Nota Kesepahaman	PN
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Nota Kesepahaman	PN
24	MPR, KEMENDIKBUDRISTEK, BRIN DAN LEMHANAS	Nota Kesepahaman	PN
25	Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Dept 5)	Perjanjian Kerja Sama	PN
26	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Nota Kesepahaman	PN
27	Pemerintah Kabupaten Bangka	Nota Kesepahaman	Non PN
28	Pemerintah Kabupaten Selayar	Nota Kesepahaman	Non PN
29	Pemerintah Prov Sulawesi Utara	Nota Kesepakatan	PN
30	Pemerintah Kab Kepulauan Sangihe	Nota Kesepakatan	PN
31	Pemerintah Kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Nota Kesepakatan	PN
32	Pemerintah Kepulauan Talaud	Nota Kesepakatan	PN
33	Pemerintah Kota Manado	Nota Kesepakatan	PN
34	Pemerintah Kota Bitung	Nota Kesepakatan	PN
35	Pemerintah Kab Minahasa	Nota Kesepakatan	PN
36	Pemerintah Kab Minahasa Selatan	Nota Kesepakatan	PN
37	Pemerintah Kab Minahasa Tenggara	Nota Kesepakatan	PN
38	Pemerintah Kab Minahasa Utara	Nota Kesepakatan	PN
39	Pemerintah Kota Tomohon	Nota Kesepakatan	PN
40	Pemerintah Kota Kotamobagu	Nota Kesepakatan	PN

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
41	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow	Nota Kesepakatan	PN
42	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Selatan	Nota Kesepakatan	PN
43	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Timur	Nota Kesepakatan	PN
44	Pemerintah Kab Bolaang Mongondow Utara	Nota Kesepakatan	PN
45	Pemerintah Prov Jawa Timur	Nota Kesepakatan	PN
46	Pemerintah Kota Surabaya	Nota Kesepakatan	PN
47	Pemerintah Kab Bangkalan	Nota Kesepakatan	PN
48	Pemerintah Kab Sidoarjo	Nota Kesepakatan	PN
49	Pemerintah Kab Gresik	Nota Kesepakatan	PN
50	Pemerintah Kab Sampang	Nota Kesepakatan	PN
51	Pemerintah Kab Pamekasan	Nota Kesepakatan	PN
52	Pemerintah Kab Sumenep	Nota Kesepakatan	PN
53	Pemerintah Kab Bojonegoro	Nota Kesepakatan	PN
54	Pemerintah Kab Tuban	Nota Kesepakatan	PN
55	Pemerintah Kab Jombang	Nota Kesepakatan	PN
56	Pemerintah Kab Lamongan	Nota Kesepakatan	PN
57	Pemerintah Kota Mojokerto	Nota Kesepakatan	PN
58	Pemerintah Kab Mojokerto	Nota Kesepakatan	PN
59	Pemerintah Kota Kediri	Nota Kesepakatan	PN
60	Pemerintah Kab Kediri	Nota Kesepakatan	PN
61	Pemerintah Kota Madiun	Nota Kesepakatan	PN
62	Pemerintah Kab Madiun	Nota Kesepakatan	PN
63	Pemerintah Kab Ponorogo	Nota Kesepakatan	PN
64	Pemerintah Kab Ngawi	Nota Kesepakatan	PN
65	Pemerintah Kab Trenggalek	Nota Kesepakatan	PN
66	Pemerintah Kab Tulungagung	Nota Kesepakatan	PN
67	Pemerintah Kab Pacitan	Nota Kesepakatan	PN
68	Pemerintah Kota Blitar	Nota Kesepakatan	PN
69	Pemerintah Kab Blitar	Nota Kesepakatan	PN
70	Pemerintah Kab Nganjuk	Nota Kesepakatan	PN
71	Pemerintah Kota Malang	Nota Kesepakatan	PN
72	Pemerintah Kab Magetan	Nota Kesepakatan	PN
73	Pemerintah Kab Malang	Nota Kesepakatan	PN
74	Pemerintah Kota Pasuruan	Nota Kesepakatan	PN
75	Pemerintah Kab Pasuruan	Nota Kesepakatan	PN
76	Pemerintah Kota Batu	Nota Kesepakatan	PN
77	Pemerintah Kab Jember	Nota Kesepakatan	PN
78	Pemerintah Kab Probolinggo	Nota Kesepakatan	PN
79	Pemerintah Kab Situbondo	Nota Kesepakatan	PN
80	Pemerintah Kab Bondowoso	Nota Kesepakatan	PN
81	Pemerintah Kab Lumajang	Nota Kesepakatan	PN
82	Pemerintah Kab Banyuwangi	Nota Kesepakatan	PN

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
83	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Nota Kesepakatan	PN
84	Pemerintah Kota Samarinda	Nota Kesepakatan	PN
85	Pemerintah Kota Bontang	Nota Kesepakatan	PN
86	Pemerintah Kab Kutai Kartanegara	Nota Kesepakatan	PN
87	Pemerintah Kab Kutai Timur	Nota Kesepakatan	PN
88	Pemerintah Kab Berau	Nota Kesepakatan	PN
89	Pemerintah Kab Paser	Nota Kesepakatan	PN
90	Pemerintah Kab Paser Utara	Nota Kesepakatan	PN
91	Pemerintah Kab Kutai Barat	Nota Kesepakatan	PN
92	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Nota Kesepakatan	PN
93	Pemerintah Kota Balikpapan	Nota Kesepakatan	PN
94	Pemerintah Kota Padang Panjang	Nota Kesepakatan	Non PN
95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang	Perjanjian Kerjasama	Non PN
96	Universitas Flores (Dep 1)	Perjanjian Kerja Sama	PN
97	Universitas Flores	Nota Kesepahaman	PN
98	Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia	Kemitraan	PN
99	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Nota Kesepahaman	PN
100	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Dep 5)	Perjanjian Kerja Sama	PN
101	Direktorat Program dan Produksi LPP RRI (Dep 1) - (Sulut)	Perjanjian Kerja Sama	PN
102	LPP TVRI Stasiun Sulawesi Utara	Perjanjian Kerja Sama	PN
103	IAIN Kerinci	Perjanjian Kerja Sama	PN
104	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Perjanjian Kerja Sama	Non PN
105	Universitas Brawijaya	Perjanjian Kerja Sama	PN
106	Universitas Bangka Belitung (Dep 1)	Perjanjian Kerja Sama	PN
107	Jawa Pos Media Televisi (JTV)	Perjanjian Kerja Sama	PN
108	Direktorat Program dan Produksi LPP RRI (Dep 1) - (Jatim)	Perjanjian Kerja Sama	PN
109	LPP TVRI Stasiun Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama	PN
110	PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Perjanjian Kerja Sama	PN
111	Universitas Sebelas Maret (UNS)	Perjanjian Kerja Sama	PN
112	PSP Pancasila UNS	Perjanjian Kerja Sama	Non PN

Untuk menjadikan BPPI mampu melaksanakan implementasi di lapangan dengan kewenangan untuk dapat mengkoordinasikan seluruh penyelenggara negara baik di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya sebagai *leading sector* dalam hal PIP agar terwujudnya kesamaan pola pikir, pola gerak, dan pola tindak dalam melaksanakan PIP

kepada masyarakat harus lebih lagi ditingkatkan, khususnya meningkatkan sinergitas dan menggelorakan semangat gotong royong antar Lembaga.

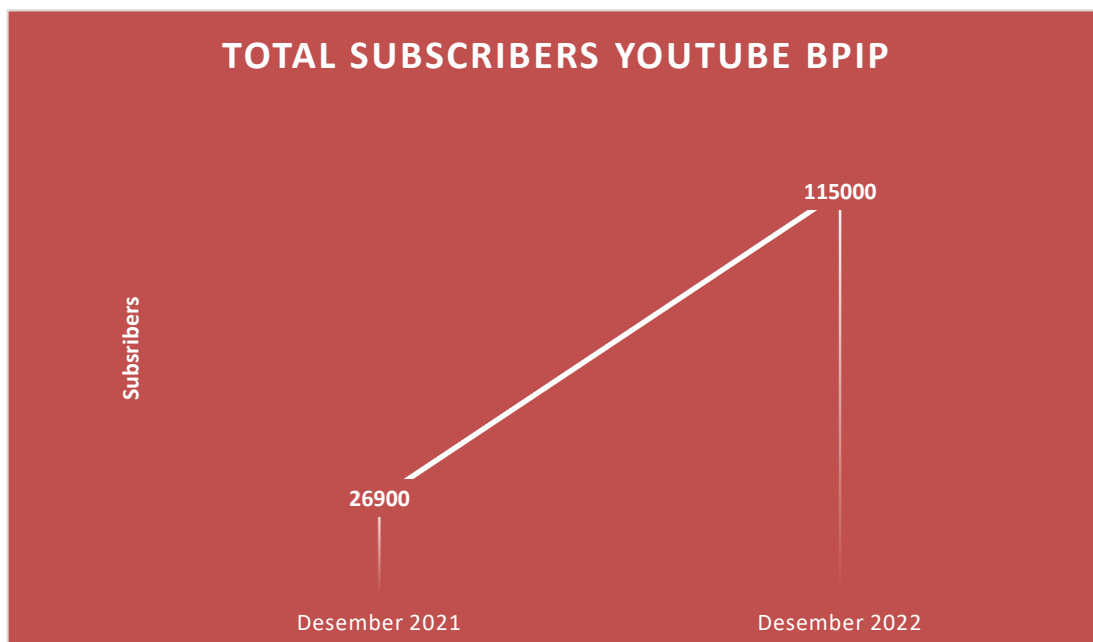
Sebagaimana Arahan Presiden pada kegiatan *Presidential Lecture* mengenai Internalisasi dan Pembedaan Pancasila, pada tanggal 3 Desember 2019, Presiden mengamanatkan bahwa ke depan, 129 juta anak-anak muda (hampir 48 persen populasi Indonesia), kalau tidak mengerti masalah ideologi, tidak mengerti masalah Pancasila, berbahaya bagi negara. Maka perlu dilakukan melaksanakan PIP yang efektif, baik dan benar dengan melakukan sosialisasi, komunikasi serta pembuatan jaringan kepada generasi penerus melalui pendekatan media dengan mengedepankan kegiatan yang disukai yaitu: olahraga, musik, film, seni budaya serta kuliner yang didalamnya ada nilai-nilai Pancasila.

BPIP dalam metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan melakukan dengan cara membuat kegiatan dalam rangka menyusun materi sosialisasi di media sosial, pelaksanaan sosialisasi, penyusunan materi komunikasi pada media masa, pelaksanaan komunikasi pada media online dan media radio, layanan jaringan komunitas, yang memberitakan konten-konten yang bernuansakan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan Media sebagai sarana utama baik melalui media massa, media online, media TV, dan media radio, media sosial serta aplikasi aplikasi yang terkini; mengembangkan komunikasi dengan Media Pemberitaan dari TVRI, Kompas TV, RRI, Elshinta Radio, dan lain-lain; mengembangkan jaringan dalam rangka mensosialisasikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan Organisasi Masyarakat, Jurnalis. Pengukuran dilihat dari Rating/ Viewer/ Pembaca/ Like/ Subscriber terhadap konten atau pemberitaan yang dibuat oleh BPIP dalam melaksanakan PIP.

Metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan secara kuantitas sudah sesuai arah kebijakan organisasi dengan mengedepankan media sebagai sarana utama dalam melakukan PIP. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya perhatian atas konten-konten BPIP. Rating program sosialisasi pada Media Sosial BPIP mencapai 4.541.073 *viewer* dengan 115.000 *subscriber* dimana terjadi perkembangan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya sebesar 26.900 *subscriber*, hal ini menandakan bahwa kinerja metode/media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan telah dilaksanakan secara efektif. Rating program komunikasi pada media kerjasama mencapai lebih dari 5.956.639 *viewer*.



Untuk dapat menjadikan BPIP yang mampu mensosialisasikan, mengkomunikasikan dan membuat jaringan media Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan BPIP akan selalu terus melakukan perubahan dan pengembangan metode yang terbaik agar pembinaan ideologi Pancasila sampai pesannya kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada.



Gambar 3. 5 Jumlah total subscribers youtube bpip tahun 2022

Berikut adalah beberapa kegiatan dukungan konten-konten kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan yang telah dilakukan, antara lain yaitu:

Tabel 3. 9 Tabel kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan

No	Kegiatan
1.	Podcast SAMPAN (Salam Pancasila) bersama Ketua DPRD Kota Palangkaraya
2.	Kegiatan Seminar Pancasila Series 4 “Ekonomi Pancasila Demi Terwujudnya Kesejahteraan”
3.	Sosialisasi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022 “Peran Santri dalam Mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara
4.	Diskusi Kelompok Terpumpun “Identifikasi Distorsi Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial
5.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seni, Musik dan Budaya dalam rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda “Merajut Keragaman, Memperkokoh kemanusiaan”
6.	Podcast SAMPAN (Salam Pancasila) di Universitas Syiah Kuala, Aceh
7.	Dialog Kebangsaan di Universitas Syiah Kuala, Aceh
8.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Negeri Jakarta

No	Kegiatan
9.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Diskusi Publik Sialisasi Pancasila Bersama BPIP – GPP (Gerakan Pembumian Pancasila)
10.	Kegiatan Sosialisasi Pancasila dalam rangka Penguatan PIP Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
11.	FGD Grand Desain Kolaborasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila
12.	Seminar Pancasila 2022 Series 5 Semangat Pancasila Untuk Dunia “Pancasila, Inspirasi Dunia Untuk Kesejahteraan dan Perdamaian”
13.	Sosialisasi Pancasila Nilai-Nilai Pancasila Melalui Halaqoh Kebangsaan “Peran Ulama Perempuan dalam Merawat dan Mengkokohkan Persatuan Bangsa di Jepara, Jawa Tengah
14.	Sosialisasi Pancasila “Penguatan dan Peran Strategis Perempuan Indonesia dalam Membentuk Generasi yang Berkarakter Pancasila” di Sragen, Jawa Tengah
15.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang
16.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Mataram, NTB
17.	Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022
18.	Podcast SAMPAN (Salam Pancasila) Bersama Penerima Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2022
19.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Sam Ratulangi, Manado
20.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Asahan, Sumatera Utara
21.	Podcast SAMPAN (Sosialisasi Pancasila) Bersama Ketua DPR RI
22.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Musik Kebangsaan di Universitas Udayana, Bali
23.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Komunitas Perbatasan, Natuna, Kepulauan Riau
24.	Program Spesial RTV bersama BPIP dalam rangka Hari Ibu Program “Senyum Ibu Indonesia”
25.	Sosialisasi Pancasila Seminar Nasional Kerjasama BPIP dan Fakultas Hukum Universitas Diponogoro “Penguatan Pembelajaran Pancasila Bagi Guru Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Se-Kota Semarang”
26.	Sosialisasi Pancasila di Kab. Cianjur, Jawa Barat
27.	Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
28.	Sosialisasi Pancasila di Daerah Bersama DPR RI <i>(telah terlaksana 30 lokus)</i>

Pembudayaan nilai Pancasila menjadi salah satu indikator keberhasilan PIP dengan pandangan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berpijak pada falsafah bangsa sendiri yakni Pancasila. Bertolak pada proses perumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK, Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyampaikan Dasar Filosofis Negara sebagai Falsafah hidup berbangsa dan bernegara maka sepatutnya

semua apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan harus menjunjung semua nilai-nilai Pancasila. Hal lain yang juga bisa dijadikan titik awal adalah apa yang tertuang dalam UUD 1945 semua konsepsi ideologi Pancasila telah dijelaskan untuk menuju pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai negara hukum harus memenuhi alasan filosofis, historis, antropologis, yuridis dan sosiologis, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan yang merdeka yang berdasarkan pada lima sila, maka Pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus diyakini dan menjadi pengetahuan serta diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang diyakini dan menjadi pengetahuan serta diaktualisasikan secara nyata, maka perlu dilakukan kegiatan yang dilaksanakan dari level pemerintah terendah yaitu desa/kelurahan dari sanalah proses dimulai, tahapan awal sampai dengan proses menuju desa berdikari, dimana seluruh masyarakat diharapkan sudah mampu melakukan pembudayaan gotong royong dalam mengarus-utamakan nilai-nilai Pancasila agar mampu mencerminkan setiap sila Pancasila, baik pada kinerja kelembagaan, produk regulasi, maupun berkehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses tersebut diharapkan dapat teraktualisasi dan menjadi kebiasaan yang mandarah daging (habituasi) nilai-nilai Pancasila sedini mungkin dan seluas luasnya.

Pembudayaan nilai Pancasila yang sudah dirintis saat ini sudah dilakukan melalui pendampingan desa berdikari, silaturahmi dengan komunitas adat, akseptasi (Kalarifikasi dan Konfirmasi terhadap hasil pengukuran) nilai Indek Aktualisasi Pancasila di pemerintah provinsi dan stakeholder terkait, membuat event-event pembudayaan melalui komunitas masyarakat. Adapun kelompok masyarakat yang telah dilakukan pembudayaannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10 Kelompok Masyarakat yang telah dilakukan pembudayaan

NO	Nama Pokmas/Komunitas
1.	Kampung Urang Baraya Tangerang Banten
2.	Komite Olahraga Tradisional Indonesia Jakarta
3.	Sekolah Alam Prasasti Bekasi Jawa Barat
4.	Sabadesa Sukabumi Jawa Barat
5.	Muara Gembong Bekasi Jawa Barat
6.	Windu Sasih Magelang Jawa Tengah
7.	Ibu Berdaya Jawa Timur
8.	Sadar Wisata Surabaya Jawa Timur
9.	Sanggar Sumbu Kurung Palangkaraya Kalimantan Tengah

NO	Nama Pokmas/Komunitas
10.	Seira Cerdas Ambon Maluku
11.	Paparisa Ambon Bergerak Maluku
12.	Mimbar Baca Nageka Kupang NTT
13.	Relawan Multikutur Sorong Papua Barat
14.	IPPMY Sorong Papua Barat
15.	Seni Budaya Bautaya Palu Sulawesi Tengah
16.	Rumah Belajar Ceria Palembang Sumatera Selatan
17.	Kobar 9 Palembang Sumatera Selatan
18.	Kampung Dokar Dau Malang Jawa Timur
19.	Kampung Dilem Surabaya Jawa Timur
20.	Ngadas Poncokusumo Surabaya Jawa Timur
21.	Kampung Wisata Kungku Batu Malang Jawa Timur
22.	Winner Generation Ambon Maluku
23.	Desa Pemulihan Bencana Mataram Lombok NTB
24.	Pesona Sriwijaya Palembang Sumsel
25.	Non Violent Study Circle Ambon Maluku
26.	Solud NTB
27.	Kwang Rundun Lombok NTB
28.	Desa Buarato Belu
29.	Rumah Literasi Mahkota Explore Larantuka NTT
30.	Desa Sitirejo Malang Jatim
31.	Kampung Cempluk Malang Jatim
32.	Kampung Dolly Surabaya Jatim
33.	Kampung Bago Probolinggo Jatim
34.	Unen Unen Rengah Bojonegoro Jatim
35.	Language Madura Jatim
36.	Tanoker Ledo Kombo Jember Jatim
37.	Handil Balikpapan Kaltim
38.	Sekolah Adat Ambon Maluku
39.	Heka Leka Ambon Maluku
40.	Koperasi Yila Cahaya Abadi Jayapura Papua
41.	Kampung Sigi Sulteng
42.	Sanggar Gonenggah Sulawesi Tengah
43.	Polelea Sigi Sulawesi Tengah
44.	Pedati Palu Sulteng
45.	Solo Bersimfoni dan Sahabat Simfoni Bersatu (ASB) Solo
46.	Kampung Tato Jabung Malang Jatim
47.	Pesona Wisata Balikpapan Kaltim
48.	Japung Handil Balikpapan Kaltim
49.	Rumah Budaya Kutai Kaltim
50.	Rumah Literasi Tarakan Kalimantan Utara
51.	Kei Cerdas Langgur Maluku
52.	Kanvas Coffe Lombok NTB
53.	Belati Larantuka NTT
54.	Taman Bacaan Hutan Larantuka NTT
55.	TBM Hamfara Indragiri Hilir Riau
56.	Bakalam Ecoprint Yogyakarta
57.	Polelga Sigi Sulteng
58.	Kampung Neonasi Tangerang Banten
59.	Kampung Reptile Magelang Jawa Tengah
60.	Kampung Lawas Maspari Surabaya Jatim
61.	Kampung Tato Malang Jatim
62.	Kampung Bunjai Buntoi Kalteng
63.	Kampung Hadrah Tarakan Kalimantan Utara

NO	Nama Pokmas/Komunitas
64.	Green Moluccas Ambon Maluku
65.	Cendikiawan Kampung Labuhan Pandeglang Banten
66.	Alam Jabar Jawa Barat
67.	Reptile Rescue Borobudur Magelang Jateng
68.	Oerip Indonesia Solo Jateng
69.	Tas Taman Madura Jatim
70.	Glantung Go Malang Jatim
71.	Kampung Salak Surabaya Jatim
72.	Ndalem Pojok Kediri Jatim
73.	Kampung Dilem Malang Jatim
74.	Komunitas Tadulako Palu Sulteng
75.	Kampung Almunawar Palembang Sumsel
76.	Desa Ciseureuh Brebes Jateng
77.	Kampung Adat Jalawastu Brebes Jateng
78.	Karang Taruna Ciseureuh Brebes
79.	UMKM Desa Bale Endah Bandung Jabar
80.	Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan PPKN
81.	Kampung Adat Bius Siopat Tali Sumatera Utara
82.	Kampung Adat Sumba NTT
83.	Kampung Adat Sunda Wiwitan Kuningan Jawa Barat
84.	Kampung Adat Cipta Gelar Sukabumi Jawa Barat
85.	Komunitas Penghayat MLKI
86.	Perempuan Berkebaya
87.	IKPM Jawa Tengah
88.	SMKI Sedyo Laras
89.	KBKK Yogyakarta
90.	IKPM Jawa Timur
91.	IPR-Y Komisariat Indragiri Hilir Riau
92.	PODJOK (Paguyuban Onthel Djokjakarta)
93.	Jathilan Kudho Saputro Mbarang Wirang Binaan UNY





Penguatan Jaringan Melalui Pementasan Seni Budaya Wayang

Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dalam hal ini BPIP telah melaksanakan analisis kajian kebijakan dan regulasi yang menghasilkan 20 (dua puluh) rekomendasi peraturan perundang-undangan. Rekomendasi atas analisis kajian kebijakan dan regulasi ini menghasilkan rekomendasi peraturan perundang-undangan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan ke Pimpinan di lingkungan BPIP. Berikut adalah daftar peraturan/regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila yang telah diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti :



Tabel 3. 11 Daftar Peraturan/Regulasi yang diberikan Rekomendasi

No	Peraturan Perundang-undangan / Kebijakan
1	Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
2	Peraturan Gubernur Bali No. 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Adat
3	Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
4	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6	Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
7	Peraturan Provinsi Bangka Belitung No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil
8	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
9	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10	Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
11	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Purworejo Kabupaten Cerdas
12	Rancangan Peraturan Desa Pengaradan tentang Peraturan Ketertiban dan Keamanan Berbasis Nilai-nilai Pancasila
13	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
14	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
15	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
16	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
17	Rancangan Peraturan BPIP tentang Indikator Nilai Pancasila
18	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
19	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
20	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyakit Masyarakat



Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian semua Peraturan Perundang-undangan baik yang merupakan produk Lembaga Legislatif maupun Eksekutif, tidak boleh bertentangan dan harus berdasar pada Pancasila. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Konsekuensi logis dianutnya asas hierarki Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Tahapan yang harus dilalui dalam lahirnya suatu kebijakan atau produk perundang-undangan, adalah Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, Pengundangan dan Evaluasi, dimana nilai-nilai Pancasila sudah mulai diinternalisasi sejak awal sampai pada tahap implementasi.

Rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah, melainkan juga untuk mewujudkan hukum yang berkualitas, memuat nilai-nilai budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan global untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujud harapan dan cita-cita bangsa.



c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional

Hakikat pengembangan PIP merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (fairness), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam RPJPN dan RPJMN.

BPIP sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2022 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 12 IKU Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5	5

Berikut adalah substansi rekomendasi yang disampaikan:

Tabel 3. 13 Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden

Substansi Rekomendasi	Keterangan
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Penetapan Paskibraka dan duta Pancasila Purna Paskibraka oleh Presiden)	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila	Telah dipaparkan pada Kepala (nilai: 50)
Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terindikasi menentang Ideologi Pancasila	telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden. (nilai: 100)
Evaluasi dan Penanganan terhadap ASN yang Terindikasi menentang Ideologi Pancasila	telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden. (nilai: 100)

Substansi Rekomendasi	Keterangan
Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Perusahaan Asing dan Media yang Terindikasi menentang Ideologi Pancasila	telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden. (nilai: 100)
$*(100+50+100+100+100) : 5 \times 100\% = 90\%$	

Dalam mewujudkan arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional dilakukan langkah-langkah kegiatan strategis. Langkah Langkah strategis ini terdiri dari beberapa ruang lingkup yaitu:

Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, Dan Standardisasi Materi PIP

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang perlu untuk selalu diupayakan. Sejak era reformasi bergulir dan perkembangannya hingga saat ini, terdapat banyak persoalan yang disebabkan oleh belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Persoalan-persoalan tersebut mengarah pada adanya kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan, maka dilakukan PIP sebagai upaya untuk mencapai aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Secara kongkret hal tersebut dapat diupayakan dengan melaksanakan berbagai kajian-kajian kebijakan dan yuridis terkait dengan arah kebijakan PIP.

Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (logos) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Hal tersebut dapat dilakukan secara konkret misalnya dengan melaksanakan berbagai kajian-kajian keilmuan terkait dengan arah kebijakan PIP yang mencakup upaya untuk mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila, mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dan menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

- 1) Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;



- 2) Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- 3) Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- 4) Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis; dan
- 5) Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Dari latar belakang tersebut maka BPIP dalam rangka mewujudkan perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi PIP melakukan kegiatan strategis sebagai berikut:

- 1) Pengkajian Materi Arah Kebijakan PIP (Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila)
- 2) Pelaksanaan Standarisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran bagi Aparatur Negara (Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila)
- 3) Pelaksanaan Standarisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal PIP (Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila).

Melalui kegiatan tersebut, dapat ditampilkan beberapa output dokumen sebagai berikut:

Melalui kegiatan tersebut, dapat ditampilkan beberapa output dokumen sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Dokumen Pengkajian Materi PIP



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP BAGI GENERASI MUDA

Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengukur tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil pengendalian oleh Deputi dan Stakeholder adalah dengan melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi ke masing-masing tujuan rekomendasi atau pemanfaatnya. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diterima, maka termanfaatkan atau tidak rekomendasi hasil Pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengendalian

Output Dokumen	Jumlah	Rincian/ Penjelasan Output	Pemanfaat	Penjelasan
Dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan	1 Dok	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP	BPIP	Telah dilaporkan dalam laporan tahunan kepada Pimpinan
	1 Dok	Rekomendasi hasil pengendalian strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila		

Untuk mengukur tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi adalah dengan melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi ke masing-masing tujuan rekomendasi atau pemanfaatnya. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diterima, maka termanfaatkan atau tidak rekomendasi hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 15 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi

Output Dokumen	Jumlah	Rincian/ Penjelasan Output	Pemanfaat	Penjelasan
Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan PIP	BPIP	Telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden.
	1 Dokumen	Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi Pancasila		
	1 Dokumen	Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi Pancasila		
	1 Dokumen	Evaluasi dan penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Pancasila		

d. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Sasaran strategis berupaya memperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi juga efektivitas kinerja kelembagaan baik secara kinerja organisasi dan kinerja keuangan, maupun dalam kerangka pengawasan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam tahun 2022 sasaran tersebut telah tercapai yang diukur dari rata-rata capaian 6 indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 16 IKU Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Nilai Reformasi Birokrasi	82	80.13
Indeks Sistem Merit	0.70	0.66
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP
Nilai SAKIP	BB	BB
Nilai Profesionalisme ASN	82	51.03
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	89.12

Nilai Reformasi Birokrasi

BPIP melakukan pemantauan dan evaluasi RB secara berkala serta telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penilaian hasil PMPRB Tahun 2022, diketahui nilai/hasil akhir penilaian PMPRB sebesar 80,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Penilaian PMPRB Sesuai Aplikasi PMPRB

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB	
						Pusat	Unit		
A.	PENGUNGKIT				60,00	45,61	31,54	45,49	
	I.	PEMENUHAN (20)			20,00	16,90	12,26	16,89	
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN			2,00	1,85	1,80	1,83
			i.	Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,37	0,39	
			ii.	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40	0,37	0,39	
			iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,74	0,73	0,74	
			iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,31	0,32	0,32	
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN			2,00	1,75	0,75	1,75
			i.	Harmonisasi	1,00	0,75	0,75	0,75	
			ii.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	1,00	1,00		1,00	
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			3,00	3,00	2,00	3,00
			i.	Penataan Organisasi	1,00	1,00		1,00	
			ii.	Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00	1,00	1,00	
			iii.	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00	1,00	1,00	
		4	PENATAAN TATALAKSANA			2,50	1,64	0,64	1,64
			i.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,41	0,37	0,39	
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,50	0,98		0,98	
			iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,25	0,27	0,26	

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		3,00	2,51	1,11	2,49
			i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20	0,20	0,20
			ii.	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	0,40	0,40		0,40
			iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,11	0,13	0,12
			iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka	1,20	0,96		0,96
			v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,29	0,28	0,29
			vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,20	0,19	0,20
			vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,15	0,10	0,13
			viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20	0,20	0,20
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50	2,50	2,34	2,42
			i.	Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00
			ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50	1,34	1,42
		7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,50	2,08	1,82	2,08
			i.	Gratifikasi	0,30	0,30	0,29	0,30
			ii.	Penerapan SPIP	0,30	0,30	0,29	0,29
			iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50	0,47	0,49

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
			iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30	0,28	0,29
			v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,25	0,23	0,24
			vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,15	0,25	0,20
			vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,30	0,28		0,28
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2,50	1,56	1,80	1,68
			i.	Standar Pelayanan	0,40	0,22	0,31	0,27
			ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,20	0,26	0,23
			iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,45	0,49	0,47
			iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,29	0,37	0,33
			v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40	0,37	0,39
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)			10,00	4,45	0,00	4,45
			i.	Sistem Merit		0,63		0,63
			ii.	Kualitas Kebijakan		0,00		0,00
			iii.	Kualitas Pengelolaan Aset		0,66		0,66
			iv.	Aparatur Sipil Negara yang Profesional		0,42		0,42
			v.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,28		0,28
			vi.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0,67		0,67

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
			vii.	Kualitas Pengelolaan Anggaran		0,92		0,92
			viii.	Kualitas Pelayanan Publik		0,00		0,00
			ix.	Kapabilitas APiP		0,45		0,45
			x.	Maturitas SPIP		0,45		0,45
			xi.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		0,85		0,85
			xii.	Kualitas Pengelolaan Arsip		0,00		0,00
	III.	REFORM (30)			30,00	26,10	19,73	26,04
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00	3,00	2,88	2,94
			i.	Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50	1,38	1,44
			ii.	Komitmen Pimpinan	1,00	1,00	1,00	1,00
			iii.	Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50	0,50	0,50
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN		3,00	2,26	2,00	2,26
			i.	Peran Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00
			ii.	Penyelesaian Kebijakan	1,00	0,26		0,26
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		4,50	4,13	0,88	3,18
			i.	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50	0,88	1,19
			ii.	Penyederhanaan Organisasi	1,50	1,50		1,50
			iii.	Hasil Evaluasi Kelembagaan	1,50	1,13		1,13
		4	PENATAAN TATALAKSANA		3,75	3,75	3,75	3,75
			i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0,50	0,50	0,50	0,50

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
				Penyederhanaan Jabatan				
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,00	1,25	1,25	1,25
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,25	2,00	2,00	2,00
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		4,50	4,34	1,83	4,25
			i.	Kinerja Individu	1,00	1,00	0,92	0,96
			ii.	Evaluasi Jabatan	0,50	0,50		0,50
			iii.	Assessment Pegawai	0,50	0,50	0,42	0,46
			iv.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50	0,50	0,50
			v.	Kebutuhan Pegawai	0,50	0,50		0,50
			vi.	Penyetaraan Jabatan	0,50	0,50		0,50
			vii.	Manajemen Talenta	1,00	0,84		0,84
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75	3,14	2,83	2,99
			i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,72	0,41	0,57
			ii.	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi	1,00	1,00	1,00	1,00
			iii.	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1,00	0,67	0,67	0,67
			iv.	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75	0,75	0,75
		7	PENGUATAN PENGAWASAN		3,75	2,99	1,95	2,99
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	0,75	0,75

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
			ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60	0,60	0,60
			iii.	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)	0,60	0,60		0,60
			iv.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	0,60	0,60
			v.	Pembangunan Zona Integritas	0,60	0,06		0,06
			vi.	Peran APIP	0,60	0,38		0,38
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3,75	2,50	3,61	3,06
			i.	Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50	2,50
			ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	0,00	1,11	0,56
TOTAL PENGUNGKIT					60,00	47,44	31,99	47,38
B. HASIL (40)								
		1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)		10,00	7,21		7,21
			i.	Opini BPK (3)		3,00		3,00
			ii.	Nilai SAKIP (7)		4,21		4,21
		2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,00	8,50		8,50
			-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		8,50		8,50
		3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)		10,00	8,20		8,20

Penilaian					Bobot	Nilai		Indeks RB
						Pusat	Unit	
			-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		8,20		8,20
		4	KINERJA ORGANISASI (10)		10,00	8,84		8,84
			i.	Capaian Kinerja		5,00		5,00
			ii.	Kinerja Lainnya		1,50		1,50
			iii.	Survei Internal Organisasi		2,34		2,34
TOTAL HASIL					40,00	32,75		32,75
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					100,00	80,19	31,99	80,13

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit merupakan hasil penilaian pengelolaan sumber daya manusia yang berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Penilaian merit Sistem didasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian penerapan merit Sistem dilakukan oleh KASN di lingkungan BPIP dimulai sejak bulan desember 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut BPIP terus melakukan perbaikan dan pemenuhan aspek penilaian yang diwajibkan melalui aplikasi penilaian pada link: <https://sipinter.kasn.go.id/login>.

Tabel 3. 18 Hasil Penilaian Sistem Merit

No	Aspek	Indikator	Kondisi Saat Ini	Bobot Indikator	Skor	Nilai Tim Verifikasi	Catatan	Nilai Akhir
1	Perencanaan Kebutuhan	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	detail	2.5	4 detail	4 detail Catatan	detail	10
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	detail	2.5	4 detail	3 detail Catatan	detail	7.5
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	detail	2.5	4 detail	4 detail Catatan	detail	10
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	detail	2.5	4 detail	4 detail Catatan	detail	10
		Catatan KASN untuk Aspek 1 : (kosong)						Total 37.5
2	Pengadaan	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	detail	2	4 detail	4 detail Catatan	detail	8
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergubi/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	detail	2	4 detail	4 detail Catatan	detail	8
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	detail	2	4 detail	4 detail Catatan	detail	8
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	detail	2	4 detail	3 detail Catatan	detail	6
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	detail	2	4 detail	4 detail Catatan	detail	8
		Catatan KASN untuk Aspek 2 : (kosong)						Total 38
3	Pengembangan Karir	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	detail	5	4 detail		detail	0
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	detail	5	4 detail	4 detail Catatan	detail	20
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	detail	5	4 detail	3 detail Catatan	detail	15
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	detail	2.5	4 detail		detail	0
		5 Ketersediaan informasi tentang kesempatan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	detail	2.5	4 detail	4 detail		10
		6 Ketersediaan informasi tentang kesempatan kinerja;	detail	2.5	4 detail	1 detail Catatan	detail	2.5
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	detail	2.5	4 detail		detail	0
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	detail	2.5	4 detail	3 detail Catatan	detail	7.5
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	detail	2.5	4 detail	2 detail Catatan	detail	5
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	detail	2.5	4 detail	3 detail Catatan	detail	7.5
		Catatan KASN untuk Aspek 3 : (kosong)						Total 67.5

4	Promosi dan Mutasi	1	Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Pemerin/Peka Lembaga/ Pegawai/ Petugus/ Perantur) tentang pola karir:	baik	5	4	3	15
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Pemerin/Peka Lembaga/ Pegawai/ Petugus/ Perantur) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana sukses:	baik	2.5	4	1	2.5
		3	Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administur (Administrator dan Pengantar) secara terbuka dan kompetitif:	baik	2.5	4	4	10
		Catatan KADIN untuk Aspek 4 (Berkas)						
5	Manajemen Kinerja	1	Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi:	baik	5	4	4	20
		2	Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif:	baik	5	4	2	10
		3	Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja:	baik	2.5	3	1	2.5
		4	Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi:	baik	5	3	1	5
		5	Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir:	baik	2.5	4	1	2.5
Catatan KADIN untuk Aspek 5 (Berkas)							Total 40	
6	Pengoptimalan, Penghargaan dan Disiplin	1	Ketepatan internal internal tentang pembagian tanggung jawab berdasarkan hasil penilaian kinerja:	baik	2.5	4	2	5
		2	Ketersediaan kebijakan internal (Pemerin/ Pegawai/ Petugus/ Perantur) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi:	baik	2.5	3		0
		3	Ketepatan internal internal tentang pemberian disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya:	baik	2.5	4	4	10
		4	Pengoptimalan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai:	baik	2.5	4	2	5
Catatan KADIN untuk Aspek 6 (Berkas)							Total 20	
7	Peningkatan dan Pelayanan	1	Ketepatan peningkatan untuk pegawai (baik dari jenjang keahlian, jenjang keahlian kerja, program promosi, yang diintegrasikan secara nasional):	baik	2	4	4	5
		2	Penyediaan fasilitas untuk membantu kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi:	baik	2	4	4	5
Catatan KADIN untuk Aspek 7 (Berkas)							Total 16	
8	Sistem Informasi	1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, pengoptimalan disiplin dan pembinaan pegawai:	baik	2	3	2	5
		2	Penggunaan e-informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis online:	baik	1	4	2	2
		3	Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian:	baik	1	4	3	3
		4	Pengembangan dan penggunaan sistem informasi untuk sistem penilaian kinerja dan pengoptimalan disiplin berbasis teknologi informasi:	baik	2	4	4	5
Catatan KADIN untuk Aspek 8 (Berkas)							Total 19	
Total Akhir : 265.5								

Kategori

III

Index

0.66

Sebutan

Baik

Penilaian di atas menunjukkan bahwa BPIP pada tahun 2022 telah mencapai kategori “BAIK” dengan nilai 265,5 dari skala 400 (0.66) sekalipun telah mencapai baik, namun ada beberapa cacatan yang perlu diperbaiki pada aspek Pengembangan karier pegawai dan manajemen kinerja yang menjadi catatan penting karena memiliki kontribusi nilai yang sangat kecil.

Opini Laporan Keuangan BPK

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPIP tahun 2021, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada BPIP telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian

internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini BPIP ini telah diperoleh 3 tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2019-2021.

Nilai SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Pedoman Evaluasi SAKIP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP BPIP oleh Kementerian PAN-RB baru pertama kali dilakukan tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang disampaikan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/21/M.AA.05/2022, BPIP memperoleh nilai 60,08 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan sehingga dalam pelaksanaan implementasi SAKIP tahun 2022 BPIP telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Hasil Tindak lanjut Rekomendasi Evalausi SAKIP

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang dilakukan
<i>Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022</i>	<i>Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022</i>	
a) Tujuan dan sasaran strategis yang termuat pada dokumen perencanaan pusat dan unit kerja belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART sehingga dampak dari program dan kegiatan yang ditetapkan belum dirasakan oleh masyarakat	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja	
b) Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar unit kerja yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja	Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/ kegiatan di bawahnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi yang didasarkan pada perbaikan manajemen kinerja. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja	• Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) 2 atau 3 layer sebagai dasar perbaikan Renstra • Perbaikan Indikator

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang dilakukan
Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022	Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022	
c) Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada unit kerja sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan unit kerja dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan	Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pegawai pada setiap level organisasi	• Mapping perubahan untuk peningkatan kinerja yang lain (reformulasi pembagian anggaran)
d) Pimpinan unit kerja belum terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program/ kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh termasuk dalam pembelian reward dan punishment dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih maksimal	• Memastikan bahwa tiap unit kerja paham mekanisme kerjanya • Pengumpulan Evidence atau dokumentasi untuk dialog kinerja • Menyusun Mekanisme Monev Internal
e) Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pencapaiannya belum dirumuskan dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.	Memastikan kualitas pengungkapan informasi termasuk di dalamnya kecukupan analisis serta pengungkapan faktor pendukung dan penghambat dan strategi pencapaian dalam laporan kinerja	• Peningkatan kualitas dan pengungkapan informasi pada Laporan Kinerja

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang dilakukan
Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022	Surat Menpanrb no.B/21/M.AA.05/2022	
Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam pengungkapan informasi pada laporan kinerja		
f) Hasil evaluasi internal AKIP yang telah dilakukan terhadap unit kerja belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk memastikan tindak lanjut seluruh hasil rekomendasi evaluasi	• Penyusunan Pedoman Evaluasi sesuai dengan Permenpan 88 tahun 2022 termasuk dalam penyusunan instrumennya • Melakukan Pelatihan evaluator atas pedoman yang telah disusun
g) Pelaksanaan implementasi SAKIP belum mampu secara nyata memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi	Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi	• Hasil perbaikan RB terkait perbaikan SAKIP (Pohon Kinerja berakibat pada perbaikan proses bisnis, SOP, dll)

Hingga laporan ini dibuat, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 belum dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Hasil evaluasi Mandiri SAKIP oleh APIP BPIP (Biro Pengawasan) yang dilakukan Tahun 2022 memberikan nilai 74,77 atau kategori “BB” dengan kriteria Sangat Baik. Peningkatan nilai ini bisa tercapai karena telah dilakukannya tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan dan juga terwujudnya efisiensi dalam penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja

telah dilakukan sampai dengan level eselon 3/koordinator. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	23,68
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,13
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,75
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,70
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,90
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,24
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,94
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	16,75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	74,77

Nilai Profesionalisme ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Peilaian Nilai Profesionalisme ASN di lingkungan BPIP dilakukan oleh BKN. Berdasarkan penjelasan tersebut BPIP terus melakukan perbaikan dan pemenuhan aspek penilaian yang diwajibkan melalui aplikasi penilaian pada link: <https://ip-jasn.bkn.go.id/> . Berikut adalah Tabel data Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BPIP:



NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

Show entries Search:

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	174	17.9	5.56	22.59	4.98	51.03

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous **1** Next

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS KELAMIN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	120	18.12	5.67	22.04	4.97	50.8
Perempuan	54	17.41	5.32	23.8	5	51.53

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS JABATAN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Struktural	53	19.15	8.02	20.57	4.92	52.66
Jabatan Fungsional	55	19.45	6.18	23.73	5	54.36
Pelaksana	66	15.61	3.07	23.26	5	46.93

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENJANG JABATAN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA	0	0	0	0	0	0
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	8	20	3.12	21.88	5	50
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	12	20.42	7.5	14.17	4.67	46.75
JABATAN ADMINISTRATOR	6	18.33	5	23.33	5	51.67
JABATAN PENGAWAS	26	18.27	10.77	23.27	5	57.31
JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA	1	25	15	0	5	45
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA	45	19.67	4.33	23.78	5	52.78
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA	9	17.78	14.44	26.11	5	63.33
JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	0	0	0	0	0	0
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA	0	0	0	0	0	0
JABATAN FUNGSIONAL MAHIR	0	0	0	0	0	0
JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	0	0	0	0	0	0
JABATAN FUNGSIONAL PEMULA	0	0	0	0	0	0
JABATAN PELAKSANA	66	15.61	3.07	23.26	5	46.93

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER TINGKAT PENDIDIKAN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
S3	9	25	13.89	22.22	5	66.11
S2	83	20	4.73	20.9	4.95	50.58
S1/D4/Sederajat	82	15	5.49	24.33	5	49.82
D3/Sederajat	0	0	0	0	0	0
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	0	0	0	0	0	0
SD/SMP/Sederajat	0	0	0	0	0	0

Gambar 3. 8 Nilai Indeks Profesionalitas BPIP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi memiliki dasar hukum, maka ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menjadi acuan kegiatan penilaian kinerja dimaksud.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPIP, maka perlu ditetapkan prinsip SMART yaitu Specific (khusus), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai), Relevant (Relevan), dan Time based (berbasis waktu).

Untuk saat ini BPIP sudah membuat dan menyebarkan survei kepuasan masyarakat secara mandiri kepada stakeholder secara online pada periode Januari s.d. Agustus 2022 dengan hasil 89,12. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkup BPIP, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPIP dapat dilihat melalui grafik berikut:





Gambar 3. 9 Trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPIP

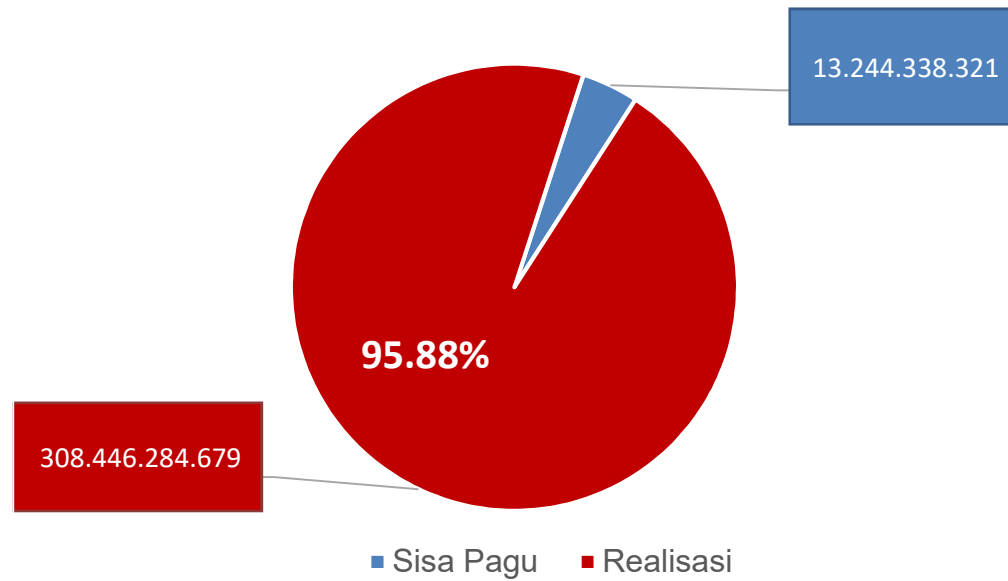
B. Capaian Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2022 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp317.652.717.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). Pada Tahun 2022 pagu tersebut mengalami tambahan anggaran sehingga total pagu anggaran pada periode tahun 2022 adalah sebesar Alokasi Rp321.690.623.000,00 (tiga ratus dua puluh satu enam ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- a. Program PIP, sebesar Rp158.053.404.000,00;
- b. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp163.637.219.000,00.

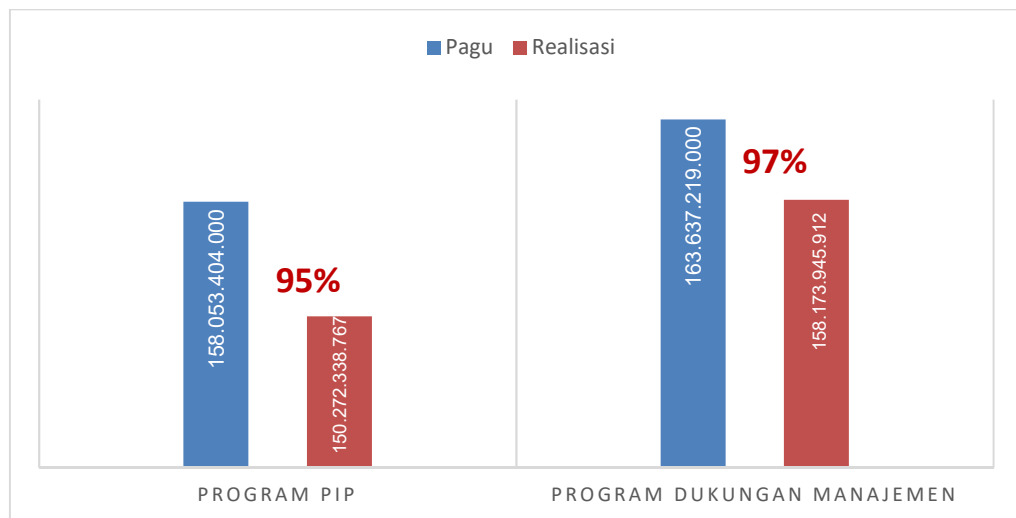
Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2022 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total:



Gambar 3. 10 Realisasi Anggaran Total

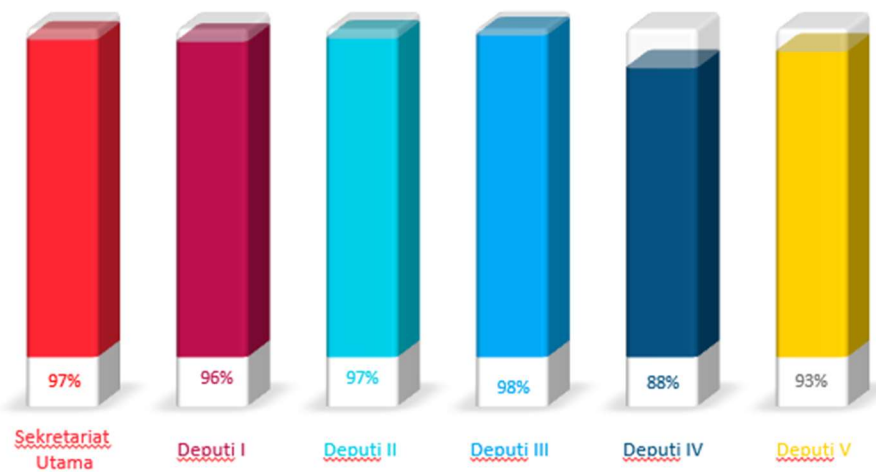
Realisasi anggaran per program:



Gambar 3. 11 Realisasi Anggaran per Program

Realisasi anggaran per unit kerja:

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA



Gambar 3. 12 Realisasi Anggaran per Unit Kerja

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSETASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		163.637.219.000	158.173.945.912	96,66%	5.463.273.088
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	4.800.000.000	4.768.645.025	99,35%	31.354.975
2	Biro Pengawasan Internal	3.122.994.000	3.080.052.493	98,62%	42.941.507
3	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	133.793.573.000	129.221.563.201	96,58%	4.572.009.799
4	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	3.900.000.000	3.634.739.261	93,20%	265.260.739
5	Biro Hukum dan Organisasi	9.790.533.000	9.434.337.480	96,36%	356.195.520
6	Pusat Data dan Informasi	8.230.119.000	8.034.608.452	97,62%	195.510.548
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		99.513.712.000	95.568.378.506	96,04%	3.945.333.494
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	6.303.261.000	6.184.549.980	98,12%	118.711.020
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	85.030.711.000	81.875.374.299	96,29%	3.155.336.701
3	Direktorat Pembudayaan	8.179.740.000	7.508.454.227	91,79%	671.285.773
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		10.675.938.000	10.355.691.940	97,00%	320.246.060
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	3.881.597.000	3.822.832.531	98,49%	58.764.469
2	Direktorat Advokasi	3.300.750.000	3.199.605.073	96,94%	101.144.927
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi	3.493.591.000	3.333.254.336	95,41%	160.336.664

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSETASE REALISASI	SISA DANA
	Kebijakan dan Regulasi				
Deputi Bidang Pengkajian Materi		10.967.420.000	10.716.701.326	97,71%	250.718.674
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.651.945.000	3.481.367.189	95,33%	170.577.811
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2.404.676.000	2.386.339.290	99,24%	18.336.710
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	4.910.799.000	4.848.994.847	98,74%	61.804.153
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		14.384.088.000	12.707.483.255	88,34%	1.676.604.745
1	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	2.083.228.000	2.047.690.351	98,29%	35.537.649
2	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	3.149.090.000	2.906.386.639	92,29%	242.703.361
3	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9.151.770.000	7.753.406.265	84,72%	1.398.363.735
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		22.512.246.000	20.924.083.740	92,95%	1.588.162.260
1	Direktorat Pengendalian	17.673.221.000	16.403.321.216	92,81%	1.269.899.784
2	Direktorat Evaluasi	4.839.025.000	4.520.762.524	93,42%	318.262.476
TOTAL		321.690.623.000	308.446.284.679	95,88%	13.244.338.321

Dalam mencapai sasaran strategis PIP di tahun 2022 dapat di simpulkan hambatan, upaya mengatasi hambatan , dan rencana ke depan adalah sebagai berikut:

C. Hambatan

- Belum adanya NSPK dalam bentuk mekanisme pemberdayaan Organisasi Masyarakat;
- Belum tersusunya materi dasar, subyek sasaran dan strategi pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila secara komprehensif;
- Belum ada Rencana Aksi Nasional tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang tertuang dalam dokumen perencanaan negara;
- Tidak adanya model baku terhadap pembinaan ideologi Pancasila khususnya materi PIP;
- Belum ada format yang baku atau pedoman dalam penyampaian hasil kajian peraturan perundang-undangann dalam wujud rekomendasi;

- f. Belum adanya pemahaman yang sama antar stakeholder/kementerian /lembaga/pemerintah daerah atas internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Peraturan Daerah.

D. Upaya Mengatasi Hambatan

- a. Menyusun NSPK dalam bentuk pedoman umum pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- b. Diselenggarakan pertemuan dengan stakeholder BPIP untuk menggali masukan guna sebagai bahan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institutionalisasi Pancasila;
- c. Merumuskan format yang baku terhadap materi PIP;
- d. Merumuskan format yang baku atau pedoman dalam penyampaian rekomendasi ke Presiden melalui Kepala BPIP kepada Ketua Dewan Pengarah;
- e. Melaksanakan sosialisasi terkait indikator nilai Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan.

E. Rencana Ke Depan

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dibangun melalui aksi – aksi berkelanjutan, antara lain: mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif masyarakat termasuk kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan, pemberian apresiasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh nusantara, meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik, sinergi antar elemen dalam masyarakat dalam membudayakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik, implementasi standarisasi materi dan bahan ajar Pancasila dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)/Sederajat, TK (Taman Kanak Kanak)/Sederajat, SD (Sekolah Dasar)/Sederajat, SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)/Sederajat, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)/Sederajat dan PT (Perguruan Tinggi)/Sederajat, termasuk Pendidikan Nonformal dan Informal, harmonisasi peraturan perundangan undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial dengan

membanjiri media sosial baik YouTube, Facebook, Instagram dengan narasi-narasi Pancasila.

Capaian kinerja BPIP tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 96,20% (NKI-Nilai Kinerja Instansi). Terdapat beberapa indikator yang masih perlu penguatan pada perspektif kapasitas organisasi BPIP, diantaranya adalah: Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai Profesionalisme ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Sistem Merit. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja BPIP tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BPIP berupaya dan selalu siap dengan perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja BPIP dapat semakin dirasakan keberadaannya dalam menjaga kondisi Bangsa Indonesia.





BAB IV

PENUTUP



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT

BAB IV | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa datang. Kondisi Pandemi yang akan didorong menjadi Endemi akan memperkuat pemulihan kondisi masyarakat, khususnya bidang ekonomi. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

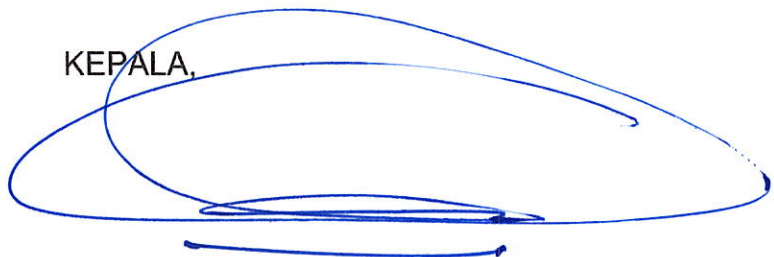
Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, mengenai pelaksanaan program dan kegiatan BPIP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan kinerja harus menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu mengawal capaian indikator-indikator kinerja yang telah ada, dan selalu siap dengan perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan, sehingga BPIP dapat semakin dirasakan keberadaannya dalam menjaga kondisi Bangsa Indonesia.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, Januari 2023

KEPALA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Prof. K.H. Drs. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2022



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yudian Wahyudi**

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Februari 2022

Kepala BPIP,



Yudian Wahyudi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Secara Nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Koordinator Dalam Pelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara Pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	60%
Terwujudnya Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	71
Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel Serta Pelayanan PIP yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai reformasi birokrasi	82
	Indeks sistem merit	0,7
	Opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Indeks profesionalisme ASN	82
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Program : Pembinaan Ideologi Pancasila
 Anggaran : Rp. 343.877.246.000,-

Jakarta, 25 Februari 2022

Kepala BPIP



Yudian Wahyudi

| PK 2022

KEPALA
BPIP